

UNDUH MAJALAH ARSIP DALAM FORMAT DIGITAL



Cara unduh majalah ARSIP dalam format digital:

1. Masuk ke *website* www.anri.go.id
2. Klik menu "Publikasi"
3. Kemudian pilih "Majalah ARSIP"
4. Unduh *file* "Majalah ARSIP"
5. Majalah ARSIP tersedia dalam *Portable Document Format* (PDF) dan dapat dibaca menggunakan *software* Adobe Acrobat

anri

Arsip Nasional Republik Indonesia

EDISI 70/SEPTEMBER-DESEMBER/2016

ARSIP

Media Kearsipan Nasional

REVOLUSI MENTAL BIDANG KEARSIPAN

ANRI-MAJALAH ARSIP

REVOLUSI MENTAL BIDANG KEARSIPAN

EDISI 70/SEPTEMBER-DESEMBER 2016





**PUSAT
JASA
KEARSIPAN**

Arsip Nasional Republik Indonesia

Mitra Terpercaya dalam Pengelolaan Arsip



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selain sebagai pembina kearsipan nasional juga ditugaskan untuk memberikan bantuan teknis secara langsung kepada pencipta arsip dalam melaksanakan kewajiban mengelola arsipnya. Bantuan teknis tersebut tidak bersifat hibah melainkan melalui pembiayaan dengan mekanisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk itu dibentuklah Pusat Jasa Kearsipan yang memiliki tugas memberikan pelayanan jasa di bidang kearsipan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia, jenis pelayanan jasa kearsipan meliputi:

- Pembuatan pedoman kearsipan untuk organisasi atau lembaga;
- Pembuatan program aplikasi sistem kearsipan;
- Pembenahan arsip;
- Pemeliharaan dan perawatan arsip;
- Penyimpanan arsip.

Informasi Lebih Lanjut
Hubungi Pusat Jasa Kearsipan ANRI:
Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta
12560 - Indonesia
Telp : +62 21 780 5851 / +62 21 781 5157 Ext. 403/506
Fax : +62 21 7810280 / +62 21 7805812
Email : pusat.jasa@gmail.com
www.jasakearsipan.anri.go.id



Selamat & Sukses Kepada: **ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Telah Memperoleh dan Mempertahankan Peringkat I
Selama Tiga Tahun Berturut-Turut (2014-2016)
Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik
Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian

anri Arsip Nasional
Republik Indonesia

Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI
Jl. Ampera Raya, No. 7
Jakarta Selatan 12560
Telp. : 021-7805851 (ext. 118)
Email : info@anri.go.id
Website : www.anri.go.id

DAFTAR ISI



5 **REVOLUSI MENTAL BIDANG KEARSIPAN**

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) juga melakukan revolusi mental sebagaimana amanat dari Presiden Jokowi. ANRI melalui kegiatan pembinaan baik di pusat maupun daerah berupaya untuk merubah *mindset* dan *cultureset* dari semua instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Perguruan Tinggi Negeri. Selama ini arsip seringkali dianggap sebagai hal sepele dan tidak memerlukan perhatian besar dalam pengelolaannya.

DARI REDAKSI _____ **4**

Khazanah /
Ina Mirawati : _____ **15**

**KETIKA ARSIP FOTO
BERCERITA TENTANG
REVOLUSI MENTAL BUDAYA
GOTONG ROYONG**

Khazanah /
Intan Lidwina : _____ **18**

**PERKEMBANGAN
PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN
DI HINDIA BELANDA**

Wawancara Khusus
Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan
Rudi Anton : _____ **21**

**MEWUJUDKAN BUDAYA TERTIB
ARSIP MELALUI PENGAWASAN
KEARSIPAN**

Daerah : _____ **24**

**MEMBUMIKAN GERAKAN
SADAR TERTIB ARSIP DI JAWA
BARAT**



9 **Arif Rahman Bramantya : REVOLUSI MENTAL, GERAKAN SADAR ARSIP DAN KESADARAN SEJARAH**

Transformasi nilai dan norma dalam masyarakat melalui sosialisasi merupakan wadah yang sempurna. Sosialisasi gerakan sadar arsip di semua lini akan membentuk watak dan karakter bangsa demi terwujudnya negara yang maju. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pendisiplinan tubuh pun menjadi salah satu metode untuk mengendalikan sifat, bahwa pembatasan kekuatan sosial akan menghasilkan penyesuaian dengan norma sosial.

Manca Negara _____ **26**

**GEDUNG PUTIH MULAI
MEMINDAHKAN ARSIP OBAMA
KE CHICAGO**

Hukum / Rayi Darmagara _____ **28**

**MENEGAKKAN REGULASI
BIDANG KEARSIPAN**

Preservasi / Atik Fara Noviana _____ **31**

**PENDIGITALISASIAN ARSIP
MUSIK LOKANANTA SEBAGAI
UPAYA PELESTARIAN MEMORI
KOLEKTIF BANGSA**

Teknologi / Sumantri : _____ **34**

**PEMANFAATAN ARSIP DATA
CITRA SATELIT LINGKUNGAN DAN
CUACA LAPAN SEBAGAI BAHAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN**



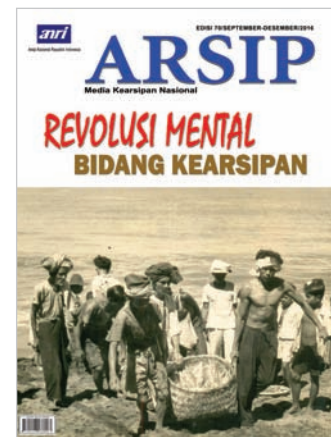
12 **Gayatri Kusumawardani : REVOLUSI MENTAL DALAM MEMANDANG DAN MEMPERLUKAKAN ARSIP TERJAGA**

Sudah saatnya, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bertanggungjawab dapat melakukan perubahan pemikiran terhadap arsip terutama arsip terjaga agar RI tidak kehilangan aset bangsa dan negara kembali karena keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Revolusi mental bisa dilakukan asalkan ada niat. Kita semua pasti bisa!

Cerita Kita / Ringga Arif WH : _____ **37**

**DI ANTARA TUMPUKAN JEJAK
(MENAPAK JEJAK MEWUJUDKAN
REVOLUSI MENTAL)**

LIPUTAN _____ **41**



Cover Designer : Isanto

KETERANGAN COVER

Para nelayan memasukkan ikan hasil tangkapannya secara bergotong-royong ke dalam keranjang untuk dijual di pasar.

Sumber:
ANRI, RVD Sumbar No. 90227 CC4

Pembina:

Kepala Arsip Nasional RI,
Sekretaris Utama Arsip Nasional RI,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi &
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab:

Syaifuddin, SE, MM

Pemimpin Redaksi:

Gurandhyka, SIP

Wakil Pemimpin Redaksi:

Dhani Sugiharto, M.Kom.

Dewan Redaksi:

Drs. Azmi, M.Si., Drs. Hilman Rosmana,

M. Ihwan, S.Sos., M.Si.,

Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si.,

Drs. Langgeng Sulistyio B,

Redaktur Pelaksana:

Bambang Barlian, S.AP.,

Susanti, S.Sos., M.Hum.,

Editor:

Aria Maulana, S.Hum., MAP

Rayi Darmagara, SH.,

R. Suryagung Sudibyo P., S.S, M.Hum.,

Drs. Muhammad Rustam,

Intan Lidwina, S.Hum., MA

Annawaty Betawinda, S.Ikom

Fotografer:

Hanif Aulia Rahman, A.Md.,

Muhamad Dullah, S.Sos

Desain Grafis:

Beny Oktavianto, A.Md

Isanto, A.Md

Sekretariat:

Khoerun Nisa Fadillah, S.IP.,

Yuanita Utami, S.IP.,

Abdul Anas

Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Subbag. Publikasi dan Dokumentasi, Bagian Humas dan TU Pimpinan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: humas@anri.go.id

Revolusi Mental merupakan gerakan seluruh rakyat Indonesia bersama dengan Pemerintah dalam memperbaiki karakter bangsa untuk menjadikan Indonesia menuju tata kehidupan yang lebih baik. lalu bagaimana dengan revolusi mental bidang kearsipan? Pada edisi ini, Majalah ARSIP mengulas mengenai revolusi mental bidang kearsipan.



Rapat Tim Redaksi

Pada rubrik Laporan Utama dan Artikel Laporan Utama kami sajikan tulisan-tulisan yang mengulas Revolusi Mental dalam perspektif kearsipan. Rubrik Khazanah kali ini mengangkat nilai-nilai gotong royong serta peran pendidikan perempuan pada masa kolonial. upaya mewujudkan budaya tertib arsip melalui pengawasan kearsipan, tim Majalah ARSIP mewawancarai Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan.

Rubrik Daerah pada edisi kali ini mengangkat "Getar Pikat" milik Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Transisi Pemerintahan Amerika Serikat menjadikan pihak "Gedung Putih" mulai memindahkan arsip-arsip Obama ke Chicago. Sementara, Hukum kearsipan menampilkan upaya menegakkan hukum kearsipan di Indonesia. Pada Rubrik Preservasi menampilkan proses pendigitalisasian arsip musik Lokananta dalam rangka pelestarian memori kolektif bangsa Indonesia. Pemanfaatan arsip data citra satelit lingkungan dan Cuaca LAPAN kami muat pada Rubrik Teknologi. Tak lupa pula kami menyajikan Cerita Kita dan berita-berita kearsipan dalam Liputan.

Akhirnya, semoga sajian informasi edisi kali ini, dapat memberikan manfaat bagi Sahabat Arsip. Sekiranya terdapat berbagai kekurangan, kami sangat berharap memperoleh saran dan kritik untuk perbaikan edisi selanjutnya. Selamat menikmati sajian kami.

Redaksi



REVOLUSI MENTAL

BIDANG KEARSIPAN

Berita mengenai oknum pejabat yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan), tawuran antar pelajar dan antar kampung, kekerasan di sekolah dan rumah tangga, serta saling menghujat satu sama lain sering kita lihat di media massa. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi pada masyarakat kita sehingga sikap-sikap negatif seringkali muncul di lingkungan masyarakat. Tak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi membawa pengaruh besar bagi bangsa Indonesia, tidak hanya dalam masalah ekonomi dan politik, budaya masyarakat Indonesia juga mendapat pengaruh besar dari budaya barat. Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena

pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek-aspek lainnya. Globalisasi tidak hanya berdampak positif, dampak negatif juga menjadi dampak dari globalisasi. Dalam hal ini sangat dibutuhkan kemampuan dalam menyaring hal positif yang harus diikuti dan membuang hal negatif. Budaya masyarakat Indonesia mendapat terpaan yang besar dari globalisasi, namun sayang sepertinya sebagian besar belum dapat menyaring mana yang harus ditiru dan mana yang tidak. Hal ini sangat mempengaruhi perubahan karakter atau mental dari sebagian besar masyarakat kita. Karakter positif dari para pendahulu kita sudah mulai hilang, dibuktikan dengan perilaku politik yang cenderung

mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, korupsi yang sudah merajalela mulai dari kalangan staf hingga pimpinan tertinggi, nepotisme dalam berbagai hal dan masih banyak lagi sikap negatif yang saat ini marak timbul di Indonesia. Kondisi ini timbul salah satunya karena derasnya arus globalisasi yang tidak diimbangi dengan upaya menjaga nilai-nilai budaya bangsa kita, sehingga merubah kearifan bangsa.

Melihat hal tersebut, apakah kita hanya diam saja? Tentu saja tidak. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengembalikan kearifan bangsa secara menyeluruh adalah dengan melakukan revolusi mental. Revolusi mental merupakan gerakan untuk



Presiden Soekarno antri bersama-sama dengan masyarakat lain di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta dalam Pemilihan Umum tahun 1955. 29 September 1955, Sumber: ANRI: Kempen 550929 FG 3-4

menggebleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala (sebagaimana Pidato Soekarno pada 1957 dalam pidato kenegaraan di DPR). Dalam diskusi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Revolusi Mental Rumah Transisi dibuat sebuah kesimpulan bahwa mentalitas bangsa kita perlu diubah secara revolusioner karena di masyarakat timbul gejala-gejala sebagai berikut : krisis nilai dan karakter; krisis pemerintahan; dan krisis relasi sosial (gejala intoleransi). Hal ini menjadi perhatian besar Presiden Joko Widodo yang akrab dengan panggilan Jokowi. Dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi, revolusi mental

menjadi salah satu agenda nasional. Dalam salah satu tulisan Presiden Jokowi yang diunggah oleh salah satu media, dikatakan bahwa perombakan yang terjadi sejak tumbangnya rezim Orde Baru, baru menyentuh perombakan secara institusional belum kepada mentalitas bangsa secara keseluruhan. Oleh sebab itu ia mencanangkan revolusi mental guna menciptakan paradigma, budaya politik dan pendekatan “nation building” baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya nusantara, bersahaja dan berkesinambungan. Ia menggunakan konsep Trisakti yang dikatakan oleh Presiden pertama kita, Soekarno pada tahun 1963 : Indonesia yang berdaulat secara politik, Indonesia yang mandiri secara ekonomi, dan Indonesia yang

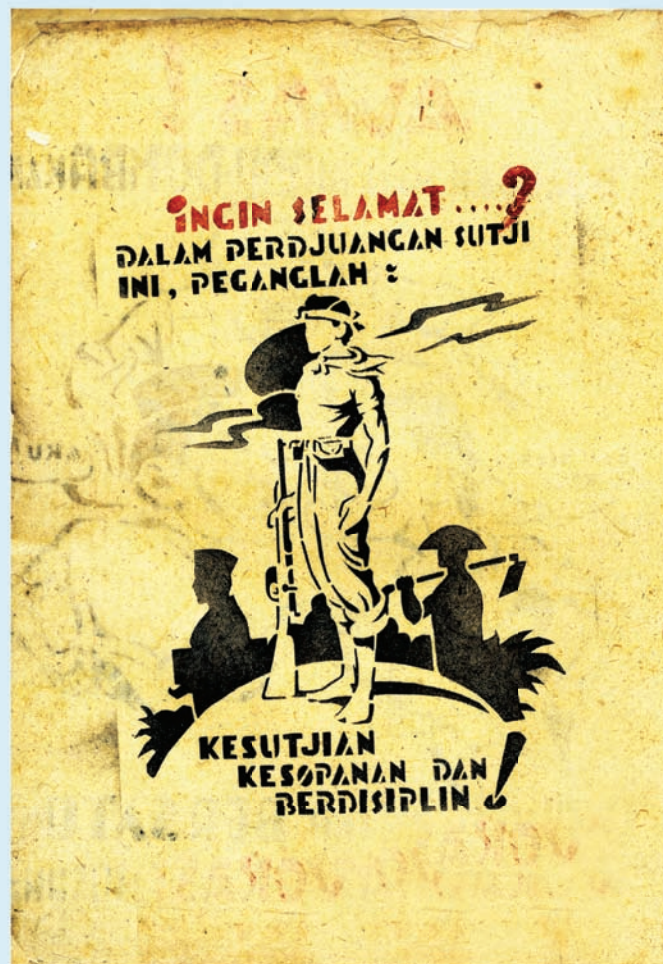
berkepribadian secara sosial budaya. Berdasarkan konsep tersebut, Presiden Jokowi ingin mewujudkan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera dengan melakukan revolusi mental pada semua lapisan masyarakat Indonesia. Ada beberapa prinsip dalam melakukan revolusi mental yaitu revolusi mental merupakan gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik; harus didukung oleh tekad politik pemerintah; harus bersifat lintas sektoral; harus ada kolaborasi masyarakat, sektor privat, akademisi dan pemerintah; dilakukan dengan program “gempuran nilai” guna senantiasa mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai strategis dalam setiap ruang publik; desain program harus mudah

dilaksanakan, menyenangkan/populer bagi seluruh segmen masyarakat; dan nilai-nilai yang dikembangkan terutama ditujukan untuk mengatur moralitas publik bukan moralitas individual serta dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian juga melakukan revolusi mental sebagaimana amanat dari Presiden Jokowi. ANRI melalui kegiatan pembinaan baik di pusat maupun daerah berupaya untuk mengubah *mindset* dan *cultureset* dari semua instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Perguruan Tinggi Negeri. Selama ini arsip seringkali dianggap sebagai hal sepele dan tidak memerlukan perhatian besar dalam pengelolaannya. Hal ini tentu harus dilakukan perubahan/revolusi sehingga arsip tidak lagi menjadi sesuatu yang terbelakang. Sebagaimana diketahui bahwa arsip sebagai bukti dari penyelenggaraan suatu kegiatan merupakan hal yang penting, tanpa arsip maka kita akan kehilangan memori kolektif. Masih ada instansi yang tidak memiliki sumber daya manusia kearsipan yang cukup guna mengelola arsip di lingkungannya, tidak menata arsip sesuai aturan, memusnahkan arsip tanpa prosedur yang benar dan hal lain yang menandakan bahwa arsip menjadi urusan yang kesekian sehingga tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Dalam sebuah wawancara, dikatakan oleh Haswan

Yunaz, Deputi V Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwa “Revolusi mental adalah bagaimana mengubah cara pandang, cara pikir, dan cara sikap yang berorientasi kepada kemajuan dan kemoderanan. Tujuannya adalah untuk membangun Indonesia yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan”. Kita ingin membangun integritas, bagaimana disiplin, bagaimana satu kata dengan perbuatan, bagaimana dapat dipercaya. Kemudian kita juga membangun etos

kerja, bagaimana motivasi, bagaimana inovasi kita bangun, dan yang ketiga bagaimana gotong royong. Tiga nilai itulah yang kita lihat kembali dan posisi Arsip Nasional menjadi penting karena nilai-nilai itu telah ditunjukkan oleh para pendahulu kita yang perlu kita gali kembali. Nilai-nilai tersebut juga harus dapat ditumbuhkan kembali dilingkungan para pelaku kearsipan mulai dari staf, pejabat fungsional dan pejabat struktural, sehingga arsip menjadi prioritas dalam pengelolaan dan penyelamatannya. Kebiasaan menggunakan arsip elektronik juga menjadi salah satu hal yang harus



Nilai-nilai kesucian, kesopanan, dan berdisiplin pernah digaungkan dalam arsip pamflet pada masa memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan
Sumber: ANRI, Koleksi Arsip Pamflet 1945-1949

LAPORAN UTAMA

dibiasakan oleh pelaku kearsipan mengingat kita sudah berada di era yang menuntut kecepatan informasi. Dalam hal layanan arsip, para pelaku kearsipan yang bertugas pada unit layanan arsip, juga harus mengubah sikap dan metode pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik, cepat dan tepat. Untuk bisa mencapai pelayanan yang baik tentu saja dibutuhkan “alat” seperti daftar arsip, inventaris dan *guide* arsip yang menjadi jalan masuk akses ke khazanah arsip dari instansi yang bersangkutan.

Sebagai instansi yang menyimpan dokumen negara, tentu ANRI memiliki banyak informasi mengenai nilai-nilai positif dari bangsa kita. Sebagai salah satu upaya dalam mendukung gerakan revolusi mental, ANRI menampilkan kembali dalam bentuk film mengenai kearifan bangsa Indonesia baik yang dilakukan oleh pejabat negara maupun oleh masyarakat. Salah satunya adalah film “Kembali kepada Jatidiri Bangsa”. Mengenai hal tersebut, Kepala ANRI, Mustari Irawan mengatakan “Kami memahami tentang pentingnya revolusi mental dalam kearsipan, dalam arti apa yang bisa diberikan oleh kearsipan terhadap revolusi mental ini. Jadi kalau kita pahami bahwa kami menyimpan begitu banyak arsip di Arsip Nasional itu sejak zaman VOC berdiri 1602 sampai kemudian sekarang ini. Kalau dipahami seperti itu maka, Arsip Nasional itu menyimpan sejarah perjalanan bangsa dimana di dalamnya itu banyak memuat tentang



Kepala ANRI Mustari Irawan (kanan) dan Deputi V Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Haswan Yunaz (tengah) pada acara Talkshow Revolusi Mental Bidang Kearsipan (Dok. Humas ANRI)

“**Sebagai salah satu upaya dalam mendukung gerakan revolusi mental, ANRI menampilkan kembali dalam bentuk film mengenai kearifan bangsa Indonesia**”

nilai-nilai manusia Indonesia, baik itu ketika menjelang kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, dan sesudah kemerdekaan. Nah, nilai-nilai inilah yang kami simpan sebagai sebuah memori kolektif bangsa. Jadi banyak peristiwa yang disimpan di Arsip Nasional itu yang sesungguhnya ini harus kita hidupkan kembali pada masa sekarang ini sehingga dia bisa menjadi bagian pembelajaran bagi masyarakat kita di saat sekarang

ini. Karena kita banyak melihat dan mengetahui bagaimana karakteristik bangsa kita di masa lalu. Banyak para pemimpin sebagai *founding fathers* bangsa kita itu bisa dijadikan contoh pada saat sekarang ini. Nah inilah yang kami simpan di antaranya adalah tentang para pemimpin ini dan ini saya kira sangat penting sekali untuk bisa diungkapkan sebagai bagian dari proses pembelajaran sebagai bagian dari *learning process* untuk bangsa kita agar mereka bisa tahu mengenai bangsa kita di masa lalu”.

Dengan melakukan revolusi mental kearsipan maka kearsipan Indonesia akan semakin maju dan berperan besar dalam membangun bangsa, menjadi garda terdepan dan mendukung NKRI dalam transparansi dan akuntabilitas. (SS)



Arif Rahman Bramantya :

REVOLUSI MENTAL, GERAKAN SADAR ARSIP DAN KESADARAN SEJARAH

Revolusi dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia di era kemerdekaan dapat dimaknai sebagai perubahan ketatanegaraan baik dalam pemerintahan maupun dalam berkeadilan sosial melalui serangkaian perjuangan fisik demi terwujudnya sebuah bangsa yang merdeka, adil dan makmur. Gagasan revolusi nasional dilontarkan pertama kali oleh Soekarno pada tahun 1956 karena kondisi negara pada saat itu mengalami stagnasi dalam bidang sosial-ekonomi dan tujuan revolusi nasional memang belum tercapai. Bahkan sampai saat inipun revolusi nasional belum mencapai puncaknya meskipun arti revolusi dimaknai dalam sudut pandang yang berbeda.

Terkait dengan revolusi nasional yang didengungkan oleh Soekarno, salah satu program Presiden Jokowi saat ini adalah Revolusi Mental, yang tertuang dalam butir ke-8 dalam Nawa Cita yaitu:

“Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional

dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.”

Revolusi Mental merupakan gerakan seluruh rakyat Indonesia bersama dengan Pemerintah dalam memperbaiki karakter bangsa untuk menjadikan Indonesia menuju tata kehidupan yang lebih baik. Masalah mendesak yang dihadapi Indonesia saat ini memang merujuk pada perilaku korup dan politisasi agama untuk tujuan politik. Salah satu langkah yang bisa diambil untuk mereduksi dan menghilangkan perilaku korup adalah dengan menumpas mental permisif perilaku itu sendiri. Di samping itu, masalah yang tidak kalah mendesak selain perilaku korup dan politisasi agama adalah rendahnya apresiasi kearsipan yang nantinya berdampak serius pada perkembangan peradaban sebuah bangsa (Indonesia) di masa

datang. Ciri-ciri bangsa yang maju dapat dilihat dari kesadaran akan pentingnya arsip yang tercermin oleh sistem administrasi nasionalnya yang tertib. Disamping itu, kesadaran akan kegiatan dokumentasi dan kerja pengarsipan akan berbanding lurus dengan tingkat kemajuan sebuah bangsa.

Rendahahnya apresiasi kearsipan di dalam suatu instansi atau lembaga memang di cap sebagai salah satu penyebab stagnasi perkembangan dalam pengelolaan arsip secara teknis. Ditambah dengan stigma yang menganggap bahwa urusan kearsipan merupakan second issues. Apalagi anggaran yang minim dianggap sebagai pokok permasalahan rendahnya kualitas arsiparis, sehingga penyelenggaraan kearsipan terkesan mengalami kesulitan untuk mengembangkan induk semangnya. Pengelolaan arsip seharusnya berintegrasi dengan praktek manajemen yang baik dan bersinergi sebagai upaya untuk meningkatkan apresiasi kearsipan.



Penandatanganan pencaanangan

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di Hotel Redtop Jakarta (17/08)

(Kiri-kanan : Deputi Bidang Konservasi Arsip M.Taufik, Sekretaris Utama ANRI Sumrahadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur, Kepala ANRI Mustari Irawan, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Dini Saraswati, dan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Andi Kasman)

Pentingnya Pendisiplinan Tubuh dalam Membumikan Gerakan Sadar Arsip.

Transformasi nilai dan norma dalam masyarakat melalui sosialisasi merupakan wadah yang sempurna. Sosialisasi gerakan sadar arsip di semua lini akan membentuk watak dan karakter bangsa demi terwujudnya negara yang maju. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pendisiplinan tubuh pun menjadi salah satu metode untuk mengendalikan sifat, bahwa pembatasan kekuatan sosial akan menghasilkan penyesuaian dengan norma sosial. Michel Foucault menjelaskan bahwa seseorang harus memperhatikan politik tubuh sebagai perangkat, media, dan pengetahuan. Pendisiplinan tubuh pun dapat menyangkut hal-hal kecil. Disiplin bukan berarti kehendak atas paksaan melainkan pelaksanaan atas kehendak pribadi dan sebagai pengembangan penguasaan individu terhadap tubuhnya sendiri.

Foucault menjelaskan bahwa gerak tubuh merupakan gerakan secara keseluruhan untuk bertindak secara efektif dan berguna. Dalam

skala kecil pun gerakan yang dilakukan oleh individu harus mampu berada dalam kondisi operasional. Oleh karena itu, gerakan sadar arsip tidak akan terlepas dari pentingnya kegiatan dokumentasi. Seseorang yang melakukan gerak tubuh dalam upaya untuk mendokumentasikan sesuatu hal merupakan salah satu metode pendisiplinan tubuh. Dokumentasi merupakan kerja inti demi membumikan budaya sadar arsip. Di samping itu, metode pendisiplinan tubuh melalui serangkaian pelatihan, bimbingan, pendidikan bagi individu dan penyusunan kekuatan secara bersama-sama terkait dengan usaha membumikan gerakan sadar arsip merupakan tanggung jawab kita semua.

Masyarakat sadar arsip tidak terpisahkan dari pendisiplinan tubuh seseorang melalui serangkaian kebiasaan baik yang diawali dari ruang kecil bernama keluarga dan ajaran agama. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya arsip selalu menganggap penting suatu hal yang mungkin dipandang oleh sebagian orang remeh dan tidak bermanfaat sama sekali. Namun apa

yang sebenarnya remeh dan tidak bermanfaat justru memiliki nilai. Dalam konteks ini contoh kecil yang dapat diambil adalah kegiatan pengarsipan yang dilakukan oleh seseorang melalui penataan arsip pribadi. Contoh kecil lainnya adalah pengumpulan struk belanja bulanan yang sebenarnya remeh tapi memiliki nilai. 50 tahun ke depan melalui struk belanja bulanan, para peneliti, ahli ekonomi bahkan sejarawan akan dapat menganalisis perkembangan ekonomi di suatu wilayah yang nantinya akan berguna bagi daerahnya tersebut untuk pengembangan di sektor ekonomi.

Arsip juga merupakan media pembelajaran, pembentukan cara pandang dan sumber ilmu pengetahuan tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan individu untuk menekankan pentingnya arsip dalam berbagai bidang kehidupan. Namun permasalahannya adalah apakah pentingnya arsip sudah dibarengi dengan totalitas kerja kearsipan dan kesadaran akan sejarah? Bagi sebagian orang, kesadaran kerja pengarsipan yang baik dan benar serta perhatian akan pentingnya arsip dirasa masih kurang. Akibatnya tidak jarang kasus hilangnya arsip menjadi perhatian publik sebagai masalah yang biasa.

Disisi lain, hilangnya arsip seolah-olah menjadi "amnesia" akut, semua yang tercatat dan terekam hilang bagaikan ditelan bumi. Akibatnya memori yang telah diciptakan dalam arsip perlahan-lahan memudar karena keterbatasan ingatan manusia. Hubungan problematis antara pendisiplinan tubuh, sadar arsip dan kesadaran sejarah sebagai ranah kerja sub sistem kearsipan nantinya akan berpengaruh pada Gerakan Nasional Tertib Arsip dan hal tersebut bukan hanya sekedar wacana.

Kesadaran Sejarah

Setiap arsip pasti memiliki sejumlah nilai yang terkait dengan *consciousness of the present of the past*. Nilai yang terkandung dalam arsip meliputi nilai informasi (*informational value*) dan nilai kebuguhan (*evidential value*). Kesadaran untuk mendokumentasikan, mengumpulkan, menyimpan dan menata arsip di masyarakat masih terbilang minim. Apalagi ditambah dengan budaya lisan sebagai sebuah kultur yang melekat sampai saat ini pun membuat kegiatan tersebut di atas berjalan lambat.

Sulistyo Basuki mengutarakan beberapa alasan mengapa manusia merekam informasi diantaranya terdapat alasan pribadi, alasan sosial, alasan hukum, alasan instrumental, alasan simbolis, dan alasan ilmu pengetahuan. Apabila dirumuskan secara sederhana, alasan mengapa seseorang merekam informasi adalah mereka takut untuk lupa. Oleh karena itu, dengan keterbatasan ingatan yang dimiliki seseorang, sebuah arsip hanya dapat “berbicara” sebagai rekaman kegiatan (*recorded information*) dan keinginan seseorang untuk mengingat sesuatu atau peristiwa di masa lalu dapat ditransformasikan melalui arsip. Dengan demikian maka terbentuklah suatu memori dan identitas. Keberadaan arsip setidaknya telah membuat benteng kokoh dari penyakit “amnesia informasi”. Namun sayangnya, tidak sedikit pula usaha-usaha pengarsipan secara baik dan benar justru malah dilupakan.

Menilik perkembangan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dari waktu ke waktu sebagai lembaga kearsipan nasional, ANRI telah melakukan berbagai upaya untuk menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa melalui pameran arsip, pembuatan diorama sejarah perjalanan bangsa, sosialisasi melalui mobil layanan Masyarakat Sadar Arsip, seminar, dan lain sebagainya.

“ Keberadaan arsip setidaknya telah membuat benteng kokoh dari penyakit “amnesia informasi” ”

Apa yang dilakukan oleh ANRI dapat dimaknai secara khusus sebagai perwujudan revolusi nasional dalam menjaga memori yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Menilik dunia kearsipan kita, sekitar tahun 1980-an, dengan perkembangan teknologi informasi dan komputerisasi yang begitu pesat, muncul wacana mengenai penggunaan media lain selain kertas untuk mencatat atau merekam informasi. Wacana tersebut dikenal sebagai *paperless condition*. Sadar bahwa budaya lisan masih menempel, *paperless condition* pun dimaknai sebagai kondisi di mana dokumen-dokumen kertas tidak lagi penting. Akibatnya bagi sebagian orang, tumpukan-tumpukan kertas hanya dianggap sebagai barang yang bisa dilok-an. Padahal penggunaan kertas untuk merekam informasi sampai saat ini pun masih berdampingan dengan media-media lain.

Mengelola informasi di dalam arsip hukumnya wajib. Mengapa demikian? Sejarawan, peneliti, para ahli hukum dan lain sebagainya akan tergantung pada sumber informasi, sedangkan tersedianya sumber tersebut memerlukan keahlian dalam menanganinya. Terkait dengan sejarah, dua kepentingan ini menjadi saling melengkapi antara sejarawan dan arsiparis. Meskipun memiliki sudut pandang yang berbeda, sejarawan berkepentingan untuk menyeleksi, menganalisis, dan menyajikan

fakta dalam produk tulisan atau historiografi. Arsiparis secara khusus berkepentingan untuk menyiapkan, menata, menyimpan dan mengolah agar sumber data tersebut dapat disajikan. Kerja arsiparis adalah menjadikan bahan informasi berupa *recorded memory* yang dapat digunakan dalam berbagai bidang. Dua kepentingan yang berbeda akan menimbulkan simbiosis dan saling melengkapi, ketergantungan sejarawan terhadap hasil kerja arsiparis. Oleh karena itu, kerja arsiparis dan sejarawan ini pun harus memiliki kesadaran yang tinggi akan sejarah.

Roeslan Abdulgani menjelaskan bahwa kesadaran sejarah merupakan akumulasi pengetahuan tentang fakta-fakta sejarah beserta sebab akibatnya dan meningkatkan alam pikiran dengan logika serta peningkatan hati nurani dengan hikmah kearifan dan kebijaksanaan untuk menghadapi masa sekarang dan masa depan dengan belajar dan bercermin kepada pengalaman-pengalaman masa lalu. Arsiparis memiliki tugas untuk memastikan apakah bahan arsip memiliki kandungan nilai kebuguhan dan nilai informasi, sehingga kesadaran akan sejarah menjadi penting agar arsip yang ditanganinya pun memiliki kualitas dan kualifikasi untuk dijaga dan dilestarikan sebagai memori bersama. *The study of history is beginning of political wisdom. No documents, no history, and no memory.*

Dengan melihat kondisi kearsipan saat ini, sebuah *pequeo verba valent*, *scripta manent* seakan menjadi wajib hukumnya karena pada akhirnya revolusi mental, gerakan sadar arsip dan kesadaran sejarah yang berakar dalam kehidupan bangsa (Indonesia) akan menentukan nasib kemajuan peradaban bangsa itu sendiri dan revolusi nasional bidang kearsipan menjadi urgensi bersama yang harus segera dimulai.

Gayatri Kusumawardani

REVOLUSI MENTAL DALAM MEMANDANG DAN MEMPERLAKUKAN ARSIP TERJAGA

Indonesia selama ini sering dirundung masalah yang berkaitan dengan perbatasan, pembagian wilayah, kepulauan dengan negara-negara tetangga seperti contohnya perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia, kontrak karya dengan pihak asing yang berkaitan dengan kontrak pertambangan di Indonesia (masalah kontrak PT. Freeport) dan bahkan masalah yang berkaitan dengan orang Indonesia sendiri yang menyangkut masalah-masalah pemerintahan yang strategis seperti contohnya masalah Pemilihan Kepala Daerah yang kasusnya bisa berkepanjangan.

Untuk masalah perbatasan, kewilayahan (pembagian wilayah), dan kepulauan, dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan sengketa tentang perbatasan, kewilayahan dan kepulauan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain.

Sementara itu, kontrak karya yang bermasalah diantaranya adalah PT. Freeport dengan PT. Newmont. Padahal, banyak dasar hukum yang menaungi masalah kontrak karya ini. Dasar hukum mengenai kontrak karya antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam

No	Permasalahan	Negara Lain yang Terlibat
1	Kasus Ambalat sejak tahun 1967	Malaysia
2	Kasus Wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datuk	Malaysia
3	Kasus Pulau Simakau	Singapura
4	Kasus Pulau Batik	Timor Leste
5	Kasus Pulau Miangas	Filipina
6	Kasus Pulau Nipa	Singapura

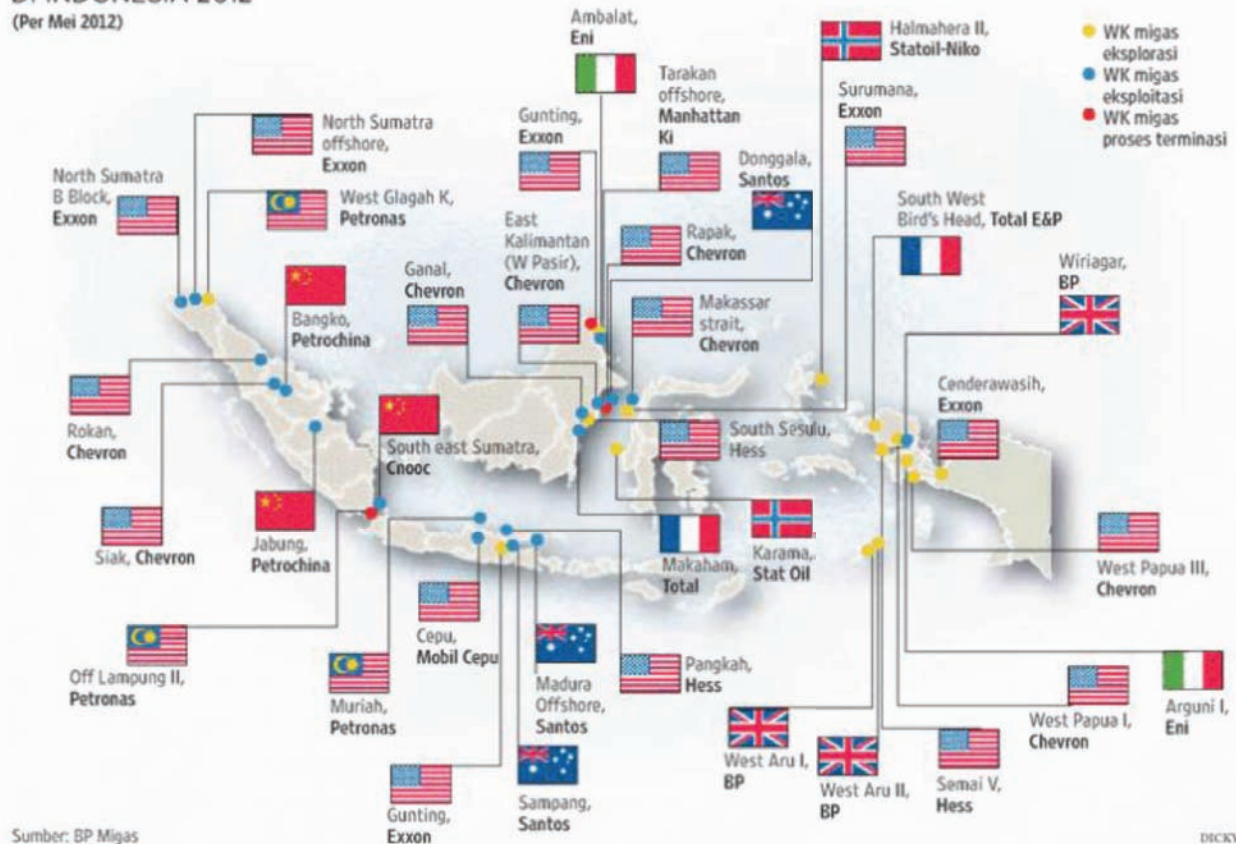
Tabel masalah perbatasan, kewilayahan (pembagian wilayah), dan kepulauan yang menunjukkan sengketa tentang perbatasan, kewilayahan dan kepulauan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain.

Negeri (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang jangka waktu Perusahaan Penanaman Modal Asing (10) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing; dan (11) Peraturan-peraturan yang di buat oleh Menteri Investasi/BKPM.

PETA KEPEMILIKAN AS DAN NEGARA LAIN ATAS WILAYAH MIGAS DAN GAS METANA BATUBARA DI INDONESIA 2012

(Per Mei 2012)



Sumber: BP Migas

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 134.K/201/M.PE/1996, persyaratan wilayah yang diperbolehkan bagi perusahaan pertambangan:

- (1) Kontrak Karya (KK), luas wilayah tidak boleh melebihi 250.000 Ha
- (2) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), luas wilayah tidak melebihi 100.000 Ha
- (3) Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum, luas wilayah tidak boleh melebihi 25.000 Ha
- (4) Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi, luas wilayah tidak boleh melebihi 10.000 Ha
- (5) Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi, luas wilayah tidak boleh melebihi 5.000 Ha.

Intisari Kontrak Karya dan

Perjanjian Karya adalah Pengusahaan Pertambangan Batubara merupakan suatu ketentuan khusus yang berlaku.

Dasar hukum dan aturan yang menaungi tentang kontrak karya banyak, tetapi masalah tentang kontrak karya yang menyangkut aset negara RI masih saja berlangsung hingga saat ini. Mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Apa yang salah mengenai hal itu? Dan mengapa hal tersebut berulang kali terjadi tanpa penyelesaian yang merugikan pihak Indonesia? Apa hubungan antara hal tersebut dengan revolusi mental yang merupakan program dari Presiden Joko Widodo untuk merevolusi mentalitas rakyat Indonesia?

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan revolusi mental? Revolusi mental

terdiri dari dua suku kata yaitu kata "revolusi" dan kata "mental". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, revolusi mempunyai arti perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang dan mental mempunyai arti bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga. Revolusi berasal dari bahasa latin yaitu *revolutio* yang berarti berputar arah adalah perubahan mendasar dalam struktur kekuatan atau organisasi yang terjadi dalam waktu singkat. Kata kuncinya adalah perubahan dalam waktu singkat. Sementara mental atau tepatnya mentalitas adalah cara berpikir atau kemampuan untuk berpikir, belajar dan merespon terhadap suatu situasi atau kondisi. Jadi revolusi mental dapat diartikan sebagai perubahan yang cepat dalam kita berpikir, bertindak dan

bekerja. Dapat juga dikatakan bahwa revolusi mental adalah aktivitas mengubah kualitas manusia kearah yang lebih bermutu dan bermental kuat dalam berbagai aspek dengan jangka waktu yang cepat.

Revolusi mental dapat dilakukan di dalam segala bidang, termasuk masalah kearsipan. Pandangan atau mindset kita terhadap masalah kearsipan harus dilakukan perubahan secara cepat atau revolusi mental kearsipan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang diakibatkan oleh hilangnya arsip sebagai bukti sah suatu peristiwa penting atau kejadian penting. Terutama setelah adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang memuat peraturan-peraturan kearsipan yang dapat menjerat siapapun yang melanggar masalah yang berkaitan dengan kearsipan ke jalur hukum.

Seperti disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyebutkan diantaranya bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa.

Salah satu pandangan atau mindset masalah kearsipan yang harus diubah adalah pandangan tentang arsip terjaga. Menurut Undang-

“Sudah saatnya, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bertanggungjawab dapat melakukan perubahan pemikiran kita terhadap arsip terutama arsip terjaga agar RI tidak kehilangan aset bangsa dan negara kembali karena keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Revolusi mental bisa dilakukan asalkan ada niat”

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, definisi Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya. Menurut Peraturan Kepala ANRI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan dan Pelaporan serta Penyerahan Arsip Terjaga, arsip terjaga meliputi arsip kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis.

Arsip-arsip yang menyangkut kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis wajib dilakukan perlindungan dan penyelamatan sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Apabila ada pihak-pihak yang mengabaikan kewajiban tersebut, dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dengan adanya revolusi mental dalam cara kita memandang dan memperlakukan arsip terjaga, maka akan berpengaruh dalam cara pengelolaan arsip-arsip kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis. Dengan semakin teratur dan bagusnya pengelolaan arsip terjaga maka

sengketa masalah kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis dapat diminimalisir atau bahkan dihindari. Di dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan dan Pelaporan serta Penyerahan Arsip Terjaga disebutkan juga bahwa instansi atau pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip terjaga mempunyai kewajiban membuat daftar arsip terjaga, kemudian melaporkan baik secara manual maupun secara elektronik ke Arsip Nasional RI. Setelah dilaporkan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip terjaga wajib diserahkan kepada ANRI dalam bentuk salinan autentik dari naskah asli paling lama 1 (satu) tahun setelah dilakukan pelaporan kepada ANRI.

Sudah saatnya, kita sebagai warganegara Indonesia yang baik dan bertanggungjawab dapat melakukan perubahan pemikiran kita terhadap arsip terutama arsip terjaga agar RI tidak kehilangan aset bangsa dan negara kembali karena keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Revolusi mental bisa dilakukan asalkan ada niat. Kita semua pasti bisa!

Ina Mirawati :

KETIKA ARSIP FOTO BERCEKITA TENTANG REVOLUSI MENTAL BUDAYA GOTONG ROYONG

Ketika Tim Transisi dari pemerintahan Joko Widodo menyerahkan arsip Revolusi Mental pada bulan April 2015 kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), ada kesadaran hakiki yang patut diacungi jempol, suatu pernyataan secara eksplisit bahwa arsip adalah sumber primer penting yang harus diselamatkan, dipelihara, dilestarikan serta nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa dan Negara.

Ide Revolusi Mental sendiri sebetulnya sudah terpatri pada tahun 1963 oleh Sukarno dengan digulirkannya konsep Trisakti yang mencakup tiga pilar, di mana salah satu intinya adalah membangun mentalitas budaya gotong royong. Kemudian Joko Widodo menggaungkan kembali Revolusi Mental yang selama ini telah mandeg dengan mengacu pada Pancasila dan Trisakti. Salah satu alasan yang diinginkan Joko Widodo ketika mencanangkan Revolusi Mental Budaya Gotong Royong dalam visi kepresidenannya adalah karena budaya gotong royong merupakan intisari Pancasila dan Revolusi Mental harus mengembalikan karakter budaya



Para nelayan memasukkan ikan hasil tangkapannya secara bergotong-royong ke dalam keranjang untuk dijual di pasar.

Sumber: ANRI, RVD Sumbar No. 90227 CC4.

gotong royong bangsa Indonesia yang dirasa telah mengalami kemerosotan dan mulai memudar. Salah satu penyebab adanya pemudaran adalah perkembangan jaman dan pengaruh masuknya budaya barat berorientasi individual yang secara perlahan semakin menggerus budaya gotong royong bangsa Indonesia.

Hubungan Revolusi Mental dengan Arsip

Arsip Nasional Republik Indonesia

telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan yang dimulai sejak saat didirikan (sebagai *Landsarchief*) pada tanggal 28 Januari 1892 di Batavia, hingga sekarang. Salah satu perubahan dan perkembangan yang nyata adalah tanggungjawab ANRI menjadi semakin luas dalam hal peran dan fungsi ANRI. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan membuat ANRI semakin eksis mengakuisisi, memelihara, mengolah

dan menyimpan arsip pemerintah, organisasi, swasta maupun perseorangan.

Kita mungkin tidak menyadari bahwa semua kegiatan yang telah ANRI lakukan itu merupakan salah satu bentuk Revolusi Mental yang telah ANRI wujudkan seiring dengan perkembangan jaman. Pelaksanaan digitalisasi dari arsip, baik arsip kertas, arsip foto, arsip film, maupun mikrofilm yang semakin dimakan usia, menyiratkan bahwa ada Revolusi Mental kebudayaan dan budaya gotong royong (dalam hal ini kerjasama dengan pihak lain) yang tidak menginginkan rusak atau musnahnya arsip masa kolonial sebagai memori kolektif bangsa. Sementara itu penyerahan arsip Revolusi Mental oleh Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 43 dan pasal 53, semakin memperkuat hubungan antara arsip dengan Revolusi Mental.

Implementasi Budaya Gotong Royong dalam Arsip Foto

Yudi Latif dalam tulisannya *Keharusan Revolusi Mental* (Kompas, 15 September 2014), menyatakan bahwa gotong royong adalah sistem nilai, sistem pengetahuan dan sistem perilaku bersama. Gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan bersama. Jika dikaitkan dengan arsip, gotong royong di sini adalah usaha bersama di antara pemerintah, swasta, organisasi maupun perseorangan untuk mensiarkan arsip sebagai suatu aset Negara yang harus dilindungi dan harus diserahkan kepada ANRI.

Sebagai sebuah lembaga Negara, ANRI menyimpan foto-foto koleksi



Perayaan Sekaten di Yogya.
Menggotong gamelan Kiai Sekati dari keraton menuju mesjid besar.
Sumber: ANRI, Kempen Yogya No. 500921 GM 25.

KIT, RVD, NIGIS, Kementerian Penerangan, dan Perseorangan. Setiap foto yang kita miliki dan kita hasilkan adalah memori kolektif, menceritakan setiap detil kejadian yang mengandung sejuta makna serta memiliki nilai sejarah.

Foto yang diperoleh dari koleksi RVD Sumatera Barat menggambarkan beberapa nelayan yang sedang mengangkut ikan hasil tangkapannya secara bergotong-royong dan membawanya ke pasar untuk dijual, merupakan cerminan bahwa ada Revolusi Mental Budaya Gotong Royong yang saling berkaitan. Tidaklah mungkin seorang nelayan mengangkut ikan hasil tangkapannya tanpa bantuan orang lain apalagi jika bebannya sangat berat. Ada juga keterkaitan Revolusi Mental Gotong Royong di sini dengan etos kerja dan peningkatan ekonomi walau secara tradisional. Etos kerja para nelayan semakin membaik dengan adanya sarana dan prasarana yang berkembang, seperti adanya bantuan kredit kepada nelayan,

perahu yang telah memakai mesin, atau perlindungan keamanan dalam berlayar. Sementara peningkatan ekonomi adalah salah satu wujud dari usaha para nelayan melalui kreativitas yang mereka raih tentang bagaimana menjual ikan hasil tangkapannya dengan harga yang tidak terlalu murah.

Gajah adalah binatang yang dapat dipergunakan untuk mengangkut barang-barang ketika sarana angkut tidak ada. Korelasi antara gajah dengan manusia adalah gotong royong yang menjadi salah satu visi revolusi mental Joko Widodo. Arsip foto ini menggambarkan bagaimana manusia juga memerlukan binatang seperti halnya manusia juga memerlukan manusia lain untuk saling menolong. Bekerja sama (yang positif) adalah suatu tindakan yang harus dipelihara hingga akhir jaman karena setiap manusia pasti saling membutuhkan. Dengan binatang pun, bekerja sama ada manfaat dan timbal balik yang saling menguntungkan. Manusia memelihara, merawat, melindungi dan



Mengangkut barang secara bergotong-royong menggunakan Gajah.
Sumber: ANRI, KIT Aceh No. 700/72

melestarikan binatang gajah, demikian pula dengan arsip yang ada di ANRI.

Mengangkut gamelan untuk merayakan tradisi Sekaten di Yogyakarta seperti yang ada pada arsip foto koleksi Kementerian Penerangan tahun 1950-an, adalah implementasi Revolusi Mental Budaya Gotong Royong yang telah ada di masyarakat Indonesia. Bagaimana jika tidak ada yang mau mengangkut gamelan pada perayaan Sekaten jika pengaruh budaya barat yang mengedepankan rasa individualisasi mempengaruhi kebersamaan yang telah ada? Jawabannya mungkin tradisi Sekaten akan lenyap padahal itu adalah salah satu tradisi budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan.

Revolusi Mental dalam arsip menantang kita semua untuk

melakukan totalitas, tidak setengah hati atau sekedar formalitas belaka. Membangun semangat gotong royong bukan kata-kata dan bukan slogan namun harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Arsip yang ada secara bertahap akan di lestarikan dengan melakukan digitalisasi arsip untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan aset Negara ini. Demikian juga dengan arsip yang masih ada di semua kementerian, swasta, organisasi, perseorangan, harus diserahkan kepada ANRI melalui prosedur yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

Semoga penggambaran yang didapat pada arsip, khususnya arsip foto mengenai Revolusi Mental Budaya Gotong Royong dapat membuka mata kita bahwa dengan adanya arsip foto tempo dulu tersebut, Revolusi Mental

dalam arsip akan semakin menguat dan jangan pernah meninggalkan budaya gotong royong. Revolusi Mental dalam arsip juga mencerminkan warisan budaya setiap bangsa dan pemimpin negeri ini. Karena tanpa arsip tidak akan ada kenangan sebagai memori kolektif bangsa. Jika Revolusi Mental Budaya Gotong Royong telah ada melalui penggambaran dalam arsip foto tempo dulu, maka rawat, pelihara, lestarikan dan amalkan dengan semangat serta etos kerja, kerja dan kerja.

Akhirnya, ketika arsip foto bercerita tentang budaya gotong royong yang adalah salah satu pilar Revolusi Mental, maka slogan Holopis-kuntul-baris harus selalu diingat, karena itulah gotong royong.

Intan Lidwina :

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN DI HINDIA BELANDA

Menempuh jenjang pendidikan tertinggi seperti *Doctoral Degree* maupun *Post Doctorate Degree* bagi perempuan saat ini sangatlah mungkin dan tidak sulit. Namun, apakah dahulu pun demikian? Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang mengenai kesetaraan gender. Terutama dalam hal ini adalah hak perempuan dalam memperoleh pendidikan. Stigma masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa perempuan harus tinggal di rumah mengurus anak dan suami serta mengurus rumah, tinggal cukup lama di dalam benak masyarakat kita. Bahkan mungkin pemikiran tersebut tidak pernah hilang dan terus ada di masyarakat terutama bagi mereka yang tinggal di daerah sub-urban.

Perjuangan perempuan Indonesia dalam memperoleh pendidikan tidak lepas dari peran beberapa tokoh perempuan penting. Sebut saja Kartini, Dewi Sartika, Rahmah El Yunusiyah, dan mungkin masih banyak lagi yang namanya tidak terlalu sering terdengar namun memiliki peran yang luar biasa bagi perempuan Indonesia. Kartini atau Raden Ajeng Kartini merupakan seorang perempuan keturunan priyayi Jawa. Kartini pernah bercita-cita untuk mengenyam pendidikan barat di Eropa namun sayangnya keinginan itu harus dikuburkannya karena situasi politik kolonial saat itu yang menganggap Kartini termasuk berpikiran revolusioner yang dapat membahayakan kaum kolonialis di



Sekolah partikelir Bumi Putera, Batavia.
Sumber Koleksi KIT Jakarta.

Hindia Belanda. Ditambah lagi dia pun mendapat tekanan dari sang ayah yang merupakan kaum feodal.

Kandasnya keinginan untuk memperoleh pendidikan barat sedikit banyak mempengaruhi pemikiran Kartini untuk mendirikan sekolah khususnya sekolah untuk perempuan. Dan itulah yang dia lakukan. Dia mendirikan sekolah yang diperuntukkan bagi kaum priyayi (perempuan). Kurikulum yang diajarkan pada sekolahnya merupakan kegiatan yang berhubungan dengan keterampilan perempuan di rumah seperti memasak, menjahit, dan lain sebagainya. Di sekolah yang didirikannya, Kartini pun

turut mengajar para perempuan cara menulis yang baik dan juga bahasa Belanda.

Sekitar sebulan setelah dia mendirikan sekolah, Kartini harus mau menuruti kemauan ayahnya untuk menjadi istri ketiga dari seorang bangsawan Jawa karena kondisi ayahnya yang sakit-sakitan. Namun, selain itu, dengan menikahi seorang bangsawan Jawa yang menduduki jabatan yang cukup strategis pada masa itu seperti suaminya, dia berharap dapat memajukan sekolahnya dan semakin banyak perempuan yang dapat mengenyam pendidikan.

Di tanah Sunda ada Raden Dewi Sartika atau yang lebih dikenal dengan nama Dewi Sartika yang juga berasal dari kalangan Menak (bangsawan Sunda). Dia mendirikan sekolah untuk perempuan yang dinamakan Sakola Istri yang pada tahun 1910 berganti nama menjadi Sakola Kautamaan Istri (sekarang bernama Sekolah Dewi Sartika). Sakola Kautamaan Putri didirikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, tepatnya tanggal 16 Januari 1904.

Dewi Sartika senang mengajar bahkan dari sebelum dia mendirikan sekolah dan pada saat dia melakukan kegiatan belajar mengajar ini, diketahui oleh C. Den Hammer, seorang Inspektur Pengajaran Hindia Belanda saat itu. Dia jugalah yang memberikan saran agar Dewi Sartika menemui Bupati Bandung, R.A. Martanegara untuk mendukung pendirian sekolah perempuan pribumi. Dan akhirnya Sakola Istri berdiri dengan jumlah murid sebanyak enam puluh siswa di mana salah satu pengajarnya adalah Dewi Sartika sendiri. Berawal dari mengajarkan keterampilan-keterampilan seperti merenda, memasak, menjahit juga membaca dan menulis, pelajaran yang diajarkan di Sakola Kautamaan Istri pun semakin banyak dan berkembang dengan menambahkan kegiatan seperti membuat dan bahasa Belanda. Berbeda dengan sekolah yang didirikan Kartini yang siswanya berasal dari kalangan priyayi, Sakola Kautamaan Istri memiliki siswa yang berasal dari kalangan masyarakat biasa. Saat ini Sakola Kautamaan Istri masih terus digunakan untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan berganti nama menjadi Sekolah Dewi Sartika.

Rahmah El Yunusiyah merupakan seorang perempuan kelahiran Minang yang selama hidupnya kental dengan nuansa Islami. Dia merupakan anak dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Yunus dan seorang ibu yang masih memiliki keturunan dengan mamak Haji Miskin, sosok yang berpengaruh dalam Perang Paderi.

Berbeda dengan Kartini dan Dewi Sartika, perjuangan Rahmah El Yunusiyah untuk mendapatkan pendidikan bagi kaum perempuan sama sekali tidak ada campur tangan dari pemerintah kolonial sama sekali.



Para siswi sekolah Kartini School (Koleksi KIT Jakarta No. 0362/028)

Bahkan bantuan berupa dana dari pemerintah kolonial dia tolak. Sama seperti Kartini dan Dewi Sartika, Rahmah El Yunusiyah pun mendirikan sekolah perempuan yang bernama Diniyyah Putri. Tentunya tidak mudah mendirikan sekolah khususnya bagi perempuan pada masa itu, gerak gerik Rahmah selaludiaawasi oleh pemerintah kolonial termasuk juga sekolahnya. Hal ini salah satunya mungkin dipicu dari ketidaksihinggaan Rahmah menerima bantuan dari pemerintah kolonial. Walaupun demikian, dia berhasil memperjuangkan pendidikan bagi perempuan dan menyebarkan pengetahuan yang dia miliki hingga keluar dari Padang Panjang yang merupakan tempat dia dilahirkan. Di Batavia, pada tahun 1935, dia berhasil mendirikan tiga perguruan putri yang bertempat di Kwitang, Jatinegara, dan Tanah Abang.

Pada tahun 1938, Rahmah El Yunusiyah mendirikan Yuniar Institut Putri, sebuah sekolah umum setingkat dengan sekolah rakyat pada masa penjajahan Belanda atau *Vervolgschool*, *Islamitisch Hollandse School* (IHS) setingkat dengan HIS (*Hollandsch Inlandse School*), yaitu sekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Selain itu, dia juga mendirikan Sekolah Dasar Masyarakat Indonesia atau yang disingkat menjadi sekolah DAMAI dan Kulliyatul Mu'allimin El Islami-

yah (KMI), sekolah Guru Agama Putra pada tahun 1940. KMI putra didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan guru-guru agama putra yang banyak didirikan oleh masyarakat di Sumatera Barat. Sayangnya, pada masa pendudukan Jepang, sekolah yang didirikan oleh Rahmah El Yunusiyah tidak dapat diteruskan karena pemerintah Jepang mengharuskan sekolah-sekolah yang ada untuk mengikuti budaya dan kurikulum Jepang.

Melihat dari ketiga tokoh perempuan di atas semakin jelas terlihat perjuangan mereka agar perempuan Indonesia dapat memperoleh hak untuk bersekolah dan tidak hanya dilahirkan untuk kemudian setelah besar dijodohkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Perjuangan Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan bahkan lebih luas lagi. Dia menentang adat yang mengekang perempuan dan menginginkan laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama dalam banyak hal. Hal ini tergambar dari suratnya yang ditujukan kepada salah seorang temannya berkebangsaan Belanda yang bernama Stella Zeehandelaar tertanggal 23 Agustus 1900, yang isinya (Kartini, 1963: 72-73):

"Ingin hatiku hendak beranak, laki-laki dan perempuan, akan ku didik, ku

bentuk jadi manusia sepadan dengan kehendak hatiku. Pertama-tama akan kubuangkan adat kebiasaan yang buruk, yang melebih-lebihkan anak laki-laki dari pada anak perempuan. Tidak usah kita herankan lagi apa sebabnya nafsu laki-laki memikirkan dirinya sendiri saja, bila kita ingat, bahwa laki-laki sejak semasa kecilnya, sudah dipelembih-lebihkan dari pada anak perempuan. Dan semasa kanak-kanak, laki-laki itu sudah diajar merendahkan derajat anak perempuan itu. Bukankah acap kali ku dengar seorang ibu berkata kepada anak-nya laki-laki, bila dia jatuh, lalu menangis;... tjis anak laki-laki me-nangis, tiada malu, seperti anak perempuan!" Anakku, laki-laki maupun perempuan akan aku ajar, supaya menghargai dan pandang-memandang sama rata, makhluk yang sama, dan didikannya akan ku samakan benar; yakni tentu saja masing-masing menurut kodrat kecakapannya."

Melihat salah satu isi surat di atas tergambar jelas bahwa Kartini menginginkan sebuah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, namun, dia juga menginginkan persamaan hal yang menurut kodratnya. Mungkin itulah pula sebabnya pada sekolah yang dia dirikan, dia tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis namun juga segala kegiatan yang biasa dilakukan oleh perempuan di rumah seperti memasak, dan membersihkan rumah.

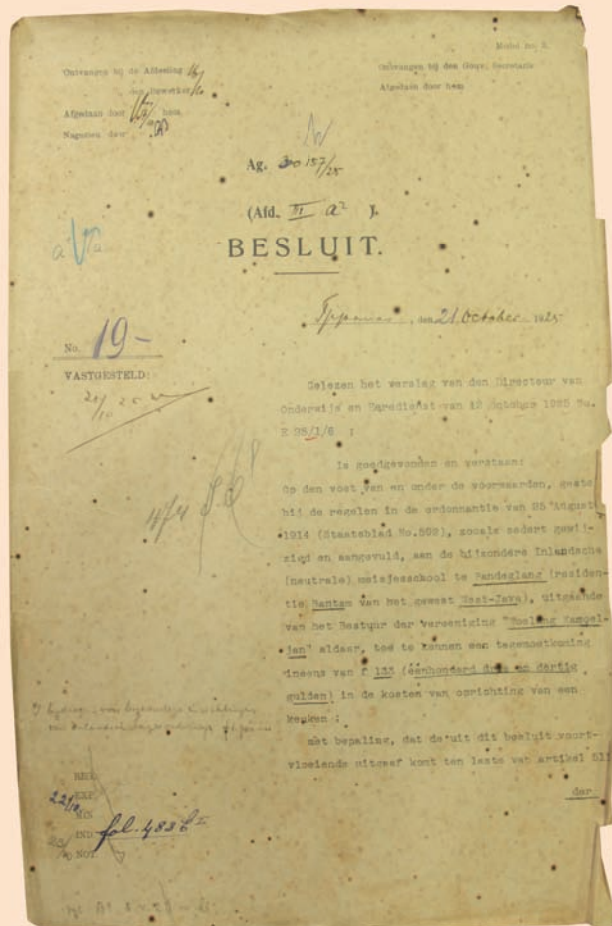
Entah dikarenakan cukup banyak bermunculannya sekolah untuk perempuan yang didirikan oleh orang pribumi atau karena alasan Politik Etis maupun atas dasar lain, pemerintah kolonial pun mendirikan sekolah untuk perempuan pribumi (*Inlandsche Meisjesschool*). Sedangkan sekolah perempuan Eropa (*Europeesche Meisjesschool*) telah lama didirikan sebelumnya. Kebiasaan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial adalah apabila ada pihak yang mendirikan sekolah (di luar kaum Eropa atau pemerintah kolonial) maka pemerintah akan mendirikan sekolah yang serupa. Seperti contoh pada saat kaum Tionghoa di Hindia Belanda mendirikan sekolah THHK (*Tiong Hoa Kwee Koan*), tidak lama setelah itu pemerintah kolonial mendirikan sekolah yang serupa yaitu HCS (*Holland Chineeze School*). Mungkin

juga dasar didirikan sekolah ini sebagai bagian pengawasan dan pembatasan gerak gerak kaum Tionghoa maupun pribumi.

Sekolah perempuan pribumi (*Inlandsche Meisjesschool*) semakin lama semakin banyak bermunculan dengan beragam jenis dan didirikan tidak hanya di Batavia tetapi juga di tempat-tempat lain seperti Manado, Pasuruan, Rangkas Bitung dan lain sebagainya. Terkait dengan orientasi keagamaan di kemudian hari bermunculan pula sekolah perempuan khusus bagi yang beragama Islam (*Bijzondere Inlandsche (Mohammedansche) Meisjesschool*) dan sekolah perempuan khusus bagi yang beragama Katolik Roma (*Roomsche Katholieke Inlandsche Meisjesschool*).

Namun, terkait dengan pelajaran yang diajarkan di sekolah perempuan

yang didirikan oleh pemerintah kolonial tidak jauh berbeda dengan yang diajarkan di sekolah di luar itu. Pelajaran yang diajarkan juga mengenai *huishoudelijke vakken* (mengenai pekerjaan rumah tangga), serta bahasa Belanda. Bagi sekolah khusus untuk perempuan pribumi, turut diajarkan juga bahasa pribumi dan bahasa lokal tempat sekolah itu berada. Contoh di sekolah perempuan pribumi di Manado diajarkan bahasa Manado. Dan untuk di sekolah khusus perempuan pribumi, di luar kurikulum sekolah namun masih terkait dengan pendidikan bagi perempuan maka disediakan waktu setidaknya dua jam dari keseluruhan jam sekolah untuk pelajaran menjahit dan setidaknya satu jam dalam seminggu disediakan waktu untuk pelajaran memasak masakan khas pribumi (*Inlandsche gerechten*).



Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tertanggal 21 Oktober 1925. Melalui arsip tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan sekolah perempuan tidak hanya ada di Batavia, tetapi juga terdapat di tempat-tempat lain seperti Pandeglang.

Sumber: ANRI

MEWUJUDKAN BUDAYA TERTIB ARSIP MELALUI PENGAWASAN KEARSIPAN

Hilangnya beberapa arsip milik negara, polemik aset negara karena tidak didukung kepemilikan arsip, sulitnya menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat di sebuah organisasi, penumpukan arsip disembarangan tempat, pengelolaan arsip yang tidak sesuai kaidah-kaidah kearsipan merupakan permasalahan kearsipan yang sangat kompleks di republik ini. Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik pula. Oleh karenanya negara wajib hadir untuk mewujudkan tata kelola kearsipan modern. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 6 ayat 1 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Guna mewujudkan budaya tertib arsip dan penyelenggaraan kearsipan nasional berjalan secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan di negara ini. Berikut ini wawancara Tim Majalah ARSIP dengan Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan Rudi Anton.

Apa itu pengawasan kearsipan?

Pengawasan kearsipan adalah suatu proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilaksanakan terhadap penyelenggaraan kearsipan dan penegakan hukum kearsipan. Namun untuk saat ini kami masih menggunakan audit kearsipan, belum mengarahkan kepada penegakan hukum, karena kami masih ingin memetakan kondisi penyelenggaraan kearsipan nasional seperti apa, dan

menggalinya sebab-sebab yang mungkin menjadikan kondisi penyelenggaraan kearsipan seperti itu.

Bagaimana proses kerja Pusat Akreditasi Kearsipan dalam melakukan pengawasan kearsipan di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD)?

Pengawasan kearsipan dilaksanakan oleh ANRI melalui Tim Pengawas Kearsipan Pusat dengan metode audit kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan

evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Alur kegiatan pengawasan kearsipan dimulai dari Perencanaan program pengawasan kearsipan, Audit Kearsipan, Penilaian Hasil Pengawasan dan Monitoring Hasil Pengawasan Kearsipan.

Perencanaan program dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan yang untuk tahun 2016 dilaksanakan dengan melibatkan seluruh obyek yang akan diaudit.

Kegiatan audit kearsipan dilaksanakan oleh tim pengawas kearsipan pusat yang melaksanakan audit kearsipan eksternal terhadap 34 Kementerian dan 33 Pemerintah Daerah Provinsi.

Penilaian hasil pengawasan dilaksanakan setelah seluruh kegiatan audit dilaksanakan dan dituangkan dalam Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) yang kemudian

WAWANCARA KHUSUS

secara nasional akan disusun menjadi Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN). Sedangkan kegiatan monitoring hasil pengawasan kearsipan baru akan dilaksanakan mulai tahun 2017.

Sudah seberapa banyak Kementerian/Lembaga di Tingkat Pusat dan Lembaga Kearsipan Daerah yang sudah diaudit pengelolaan kearsipannya?

Sampai dengan saat ini telah dilaksanakan audit kearsipan pada 34 Kementerian dan 33 Pemerintah Daerah Provinsi, namun karena terbatasnya SDM di Pusat Akreditasi Kearsipan, LAKE yang seharusnya terbit Agustus 2016, belum semuanya selesai karena masih dalam tahap pengolahan data. Dapat diinformasikan, Tim Pengawas Kearsipan masih melakukan audit sampai dengan bulan Oktober 2016, dan alokasi waktu dengan SDM yang terbatas mengakibatkan mereka belum sempat menyelesaikan LAKE tepat pada waktunya. Namun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk ANRI kedepannya dalam rangka pelaksanaan strategi yang tepat sehingga dapat melaksanakan kegiatan pengawasan dengan baik.

Setelah dilakukan pengawasan kearsipan, menurut Bapak bagaimana kondisi penyelenggaraan kearsipan di Indonesia?

Karena LAKE belum semuanya selesai, maka belum dapat secara pasti mengatakan apakah secara nasional penyelenggaraan kearsipan sudah baik atau belum, karena data-data sedang diolah saat ini.

Temuan atau permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan, terkait dengan penyelenggaraan kearsipan K/L dan LKD?

Dari beberapa diskusi yang disampaikan pada saat pleno penilaian hasil pengawasan kearsipan, terdapat beberapa masalah mendasar yang dapat disampaikan yaitu:

a. Kebijakan

Masih banyak pencipta arsip baik pusat maupun daerah yang belum mengacu pada Peraturan Kepala ANRI dalam menetapkan kebijakan kearsipan antara lain Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Program Arsip Vital. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi tersebut adalah kebijakan pada pencipta arsip ditetapkan sebelum UU, PP dan Perka lahir. Alasan lain yang sering disampaikan adalah tidak ada arsiparis pada pencipta arsip tersebut sehingga tidak dapat menyusun kebijakan, atau yang lebih miris adalah belum tahu kalau ada pengaturan mengenai hal tersebut. Untuk alasan yang terakhir sering dijumpai ketika tim pengawas menanyakan mengenai Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

b. Program

Masih banyak dijumpai pencipta arsip yang kurang bijak dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kearsipan. Ada beberapa lembaga kearsipan daerah yang proporsi alokasi anggaran kearsipan sangat kecil dibanding dengan alokasi untuk anggaran perpustakaan. Untuk di tingkat pusat masih ada pencipta arsip yang sangat minim dalam mengalokasikan anggaran kearsipan. Dengan demikian program-program kearsipan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Pengelolaan Arsip

Pengelolaan arsip di pada level kementerian, belum semuanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindehan arsip yang tidak mengalir dari unit pengolah ke unit kearsipan secara berkesinambungan, penumpukan arsip di unit-unit kerja, pemusnahan arsip yang masih belum sesuai dengan ketentuan, kesadaran untuk menyerahkan arsip ke lembaga kearsipan adalah beberapa contoh buruk kondisi pengelolaan arsip.

Kita ilustrasikan suatu kementerian yang sudah berdiri puluhan tahun, meskipun mengalami beberapa kali perubahan nama, tetapi tidak pernah melaksanakan penyusutan arsip baik melalui pemindahan, pemusnahan maupun penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan, seharusnya arsip yang tercipta dari kegiatan selama puluhan tahun pasti sangat banyak volumenya. Dari sekian banyak informasi yang seharusnya dapat digali terkait fungsi negara dalam bidang kementerian tersebut, tidak ada satupun yang dapat diberikan kepada generasi penerus.

d. Kelembagaan

Pengorganisasian kearsipan pada pencipta arsip khususnya unit kearsipan, masih banyak yang belum diatur secara khusus dalam kebijakan. Baru beberapa kementerian yang sudah mengatur pengorganisasi kearsipan secara jelas dalam kebijakan pengelolaan arsip yang menyebutkan secara eksplisit fungsi, tugas dan tanggungjawab unit kearsipan dan unit pengolah. Kementerian yang tidak secara jelas mengatur pengorganisasian kearsipan banyak yang tidak dapat berbuat banyak untuk melaksanakan pembinaan kearsipan ke unit pengolah maupun ke unit kearsipan jenjang berikutnya, karena tidak ada payung hukumnya. Termasuk juga eselonering yang menangani urusan kearsipan, kebanyakan masih berada pada level eselon IV, bahkan masih terdapat hanya merupakan fungsi yang melekat pada sub bagian tata usaha.

e. SDM

Masalah SDM menjadi penting karena merekalah yang menjadi garda terdepan dalam mengelola kearsipan dilingkungan masing-masing. Namun masih terdapat kementerian yang belum memiliki arsiparis. Dengan ketiadaan arsiparis, kementerian mengandalkan kepada pengelola arsip yang tentu saja beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Arsiparis tidak dapat mereka kerjakan. Bahkan masih terdapat suatu

kementerian yang mengandalkan “ingatan” dari pengelola arsip untuk menemukan arsip yang dicari. Tentu saja hal tersebut jauh dari teori maupun praktek kearsipan di belahan dunia manapun. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 sudah sangat jelas mengamanatkan bahwa pengelolaan arsip dilaksanakan oleh Arsiparis, namun untuk menambah kuantitas arsiparis juga bukan hal yang mudah karena ada masalah moratorium. Salah satu solusi adalah dengan impassing atau pindah jabatan baik dari jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu lainnya atau dari jabatan fungsional umum.

f. Prasarana

Kondisi prasarana dan sarana kearsipan juga belum semuanya dalam kondisi yang memenuhi standar. Masih terdapat gedung record center yang berlokasi di daerah yang rawan banjir, peralatan pencegahan bahaya kebakaran yang tidak memadai, serta ruangan dan peralatan perlengkapan record center yang belum memadai seperti rak arsip, boks arsip maupun alat pengatur suhu dan kelembaban.

Bagaimanakah rekomendasi yang dilakukan Pusat Akreditasi Kearsipan, apabila di lapangan ditemukan permasalahan. Apakah temuan-temuan itu ditindaklanjuti oleh K/L dan LKD?

Setiap tim pengawas yang melaksanakan audit kearsipan, membuat Risalah Hasil Audit Kearsipan Sementara (RHAS) yang dikonfirmasi dan diklarifikasi kepada obyek pengawasan. Pada RHAS tersebut disampaikan temuan terkait hasil audit kearsipan. Beberapa kementerian atau pemerintah daerah sudah ada yang berusaha untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut dengan berkonsultasi kepada Deputy Bidang Pembinaan Kearsipan yang menjadi pembinanya. Hal ini buat kami menjadi semacam “pertanda baik”, bahwa ternyata masih ada yang peduli dengan arsip.

Adakah sanksi bagi K/L dan LKD apabila temuan-temuan permasalahan kearsipan tidak

ditindaklanjuti?

Untuk saat ini karena pengawasan kearsipan masih diarahkan kepada pembinaan yang artinya lebih “soft” maka belum ada sanksi terhadap KL/LKD. Namun ke depannya, ketika penegakan hukum sudah dilaksanakan, maka tentu saja Kepala ANRI dapat merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab apabila tidak melaksanakan tindak lanjut rekomendasi kami, dan tindak lanjut tersebut memenuhi syarat untuk penjatuhan sanksi.

Menurut Bapak, Langkah-langkah kongkrit apa saja yang harus dilakukan agar penyelenggaraan kearsipan di Indonesia berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan peraturan perundang-undangan kearsipan?

Kita semua harus berbenah, ANRI sebagai penyelenggara kearsipan secara nasional perlu menyusun strategi yang baik, dan bila diperlukan untuk merevisi Undang-undang Kearsipan, kenapa tidak. Banyak instansi vertikal pemerintah pusat di daerah yang apabila kita telisik lebih dalam berada pada kondisi yang kurang bagus penyelenggaraan kearsipannya. Terkait pembinaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Unit Kearsipan I di kementeriannya, tapi banyak yang tidak dapat dilaksanakan karena Pimpinan Pencipta Arsip tidak membentuk Unit Kearsipan, selain itu juga

alokasi anggaran Unit Kearsipan I tidak mencukupi untuk melaksanakan pembinaan ke daerah. Hal tersebut tentu berimbas pada penyelamatan arsip statis, mereka tidak mungkin menyerahkan arsip ke lembaga kearsipan daerah provinsi, untuk penyerahan ke ANRI terbentur masalah koordinasi yang kurang dengan Unit Kearsipan I.

Terakhir, menurut Bapak perlukah ANRI menggandeng Media untuk turut serta mengumumkan pemeringkatan unit kearsipan K/L dan LKD yang berprestasi ataupun yang belum memenuhi standar kearsipan yang layak?

Pemeringkatan itu perlu untuk memacu seluruh komponen penyelenggara kearsipan melaksanakan kegiatan dengan baik. Dengan pengumuman di media, tentunya dapat memberikan efek jera bagi kementerian yang belum melaksanakan penyelenggaraan kearsipan dengan baik. (sa)



MEMBUMIKAN GERAKAN SADAR TERTIB ARSIP DI JAWA BARAT

Dalam rangka membangun komitmen seluruh aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Indonesia Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, pada saat memberikan dsambutan di acara Malam Penganugerahan ANRI Award, tanggal 17 Agustus 2016 bertempat di Hotel Redtop Pacenongan Jakarta, telah mencanangkan serta menandatangani dokumen Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip.

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) adalah suatu kebijakan nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN & RB) dan Arsip Nasional Republik Indonesia yang perlu diikuti oleh seluruh Kementerian dan lembaga Pemerintah Daerah untuk memperbaiki tata kelola kearsipan di Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan GNSTA di Jawa Barat, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapusipda) sebagai lembaga kearsipan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan suatu lembaga yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kearsipan di Jawa Barat, akan mengambil manfaat dari momen pencanangan gerakan secara sungguh-sungguh untuk memperbaiki tata kelola kearsipan di Jawa Barat.



Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, telah dinyatakan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik maka harus didukung oleh system penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan kesinambungan. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara tujuan dari tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan kinerja yang harus dicapai dalam penyelenggaraan kearsipan. Dan GNSTA merupakan upaya yang direncanakan secara sistematis, realistis, dan tepat untuk mengarahkan segala sumber daya kearsipan hingga mencapai suatu kondisi tertib arsip.

Kepala Badan Perpustakaan

dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Nenny Kencanawati telah merespon dengan cepat untuk menyebarluaskan GNSTA di Jawa Barat, serta menyusun rencana aksi nyata secara tepat melalui beberapa upaya yaitu pertama melaksanakan pencanangan GNSTA melalui gerakan di tingkat provinsi dengan Gerakan Sadar Tertib Arsip sebagai Pilar Akuntabilitas atau disingkat dengan istilah "GETAR PIKAT".

Kedua, melaksanakan pencanangan "GETAR PIKAT" di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat sebanyak 4 titik wilayah pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat. Ketiga, membangun sinergi serta komitmen dengan kabupaten/kota melalui pola kerjasama antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.



Sosialisasi Gerakan Sadar Tertib Arsip sebagai Pilar Akuntabilitas (Getar Pikat)

Keempat, melakukan interaksi dan desiminasi yang langsung dirasakan oleh masyarakat melalui publikasi “GETAR PIKAT” dan model mobile publikasi. Kelima, mengevaluasi kegiatan aksi nyata “GETAR PIKAT” secara efektif.

GNSTA telah memberikan inspirasi menjadi “GETAR PIKAT” yang akan terus menerus digaungkan ke seluruh aparatur pemerintah maupun ke seluruh pelosok desa di Jawa Barat hingga mampu mendorong aparatur pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan desa.

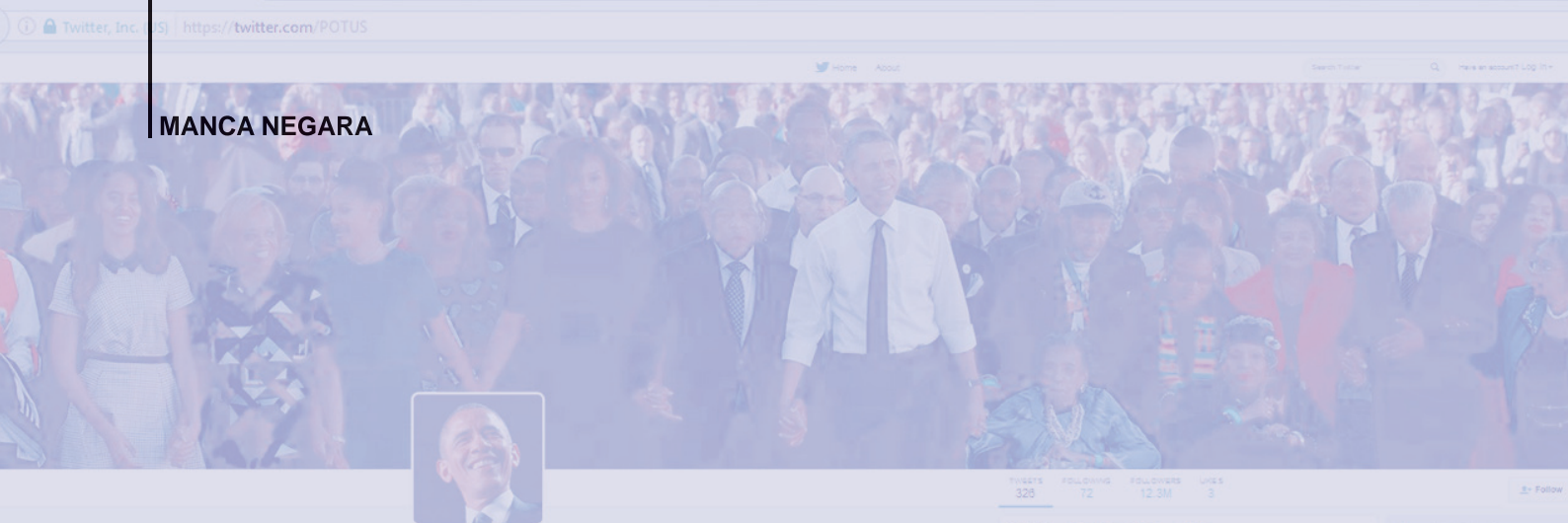
Pada tahun 2016, Bapusipda Provinsi Jawa Barat telah mendapat predikat terbaik atau juara pertama lembaga kearsipan daerah provinsi tingkat nasional Wilayah I yang meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten Sumatera Selatan. Kondisi ini harus dijadikan momentum yang sangat tepat

untuk menggelorakan semangat sadar tertib arsip melalui aksi nyata serta dalam suatu system perencanaan yang dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan kearsipan di Jawa Barat.

Oleh karena itu terdapat beberapa aspek yang seharusnya menjadi fokus atau prioritas perencanaan kearsipan yaitu : (1) Upaya internalisasi “GETAR PIKAT” melalui pendekatan bottom up maupun top down untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Arsip Daerah Kabupaten/ Kota, serta Arsip Perguruan Tinggi (2) Peningkatan pembinaan dan pengawasankearsipan (3) Peningkatan pengamanan arsip asset daerah (4) Peningkatan penyelamatan arsip bernilai kesejarahan (5) Melakukan reformasi sistem pengelolaan arsip konvensional menjadi sistem pengelolaan arsip berbasis Teknologi

Informasi Komunikasi (6) Mewujudkan Sumber Daya Manusia kearsipan yang mencukupi dan berkualitas.

Kepedulian aparatur pemerintah terhadap arsip sebagai pilar akuntabilitas bukan hanya sebagai sebuah slogan belaka, tetapi merupakan suatu kondisi yang harus dicapai oleh Bapusipda Provinsi Jawa Barat bersama seluruh stakeholder kearsipan di Jawa Barat saling bekerjasama, solid, terukur dan terarah sesuai Rencana Strategi Bapusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Kepedulian terhadap arti penting arsip adalah pintu gerbang dalam menuju serta mewujudkan kondisi yang diharapkan, arsip sebagai pilar akuntabilitas dalam menuju serta mewujudkan kondisi yang diharapkan, arsip sebagai pilar akuntabilitas dalam tata pemerintahan yang amanah (*good governance*).



GEDUNG PUTIH MULAI MEMINDAHKAN ARSIP OBAMA KE CHICAGO

Etika bagi kebanyakan pegawai yang meninggalkan pekerjaannya, mereka akan membersihkan meja dari boks-boks dan mungkin mesin penghancur kertas. Ketika pegawai kantor tersebut adalah Presiden Amerika Serikat, itu berarti pesawat kargo militer, trailer traktor yang dikawal polisi, dan mengambil tempat di dekat mesin penghancur itu.

Hari Selasa (8 November 2016), Gedung Putih mulai dengan proses yang melelahkan untuk memindahkan semua arsip Presiden Barack Obama -memo, surat, jadwal, dan ya, emailnya- ke Arsip Nasional, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan federal mengambil alih kepemilikan dokumen-dokumen tersebut ketika Obama meninggalkan kantor.

Di kantor pusat Arsip Nasional di pusat kota Washington pada hari Selasa, para anggota berseragam

militer AS sibuk membongkar palet-palet boks-boks yang berisi arsip pemerintahan Obama ke forklifts oranye. Boks-boks, yang secara hati-hati diberikan katalog slip kertas berwarna hijau dan dibungkus dengan plastik bening, bergerak dari dermaga pemuatan dan dimasukkan ke bagian belakang mobil van Ryder putih, berangkat menuju gedung yang ditetapkan sebagai gudang yang aman.

Seperti presiden-presiden sebelumnya, Obama meninggalkan kantor dengan kisah kepresidenannya yang dikemas dan siap untuk penulisan buku-buku sejarah, setidaknya bagian-bagian yang tidak dinyatakan rahasia atau tidak cocok untuk konsumsi publik.

George Washington memiliki buku harian dan surat-surat yang dibawa dengan gerobak ke Mount Vernon, yang

kemudian bahan-bahan itu digunakan secara pribadi untuk studinya sendiri. Arsip Nasional terlibat setelah masa kepresidenan Franklin D. Roosevelt, mengelola naskah-naskah eksekutif almarhum di perpustakaan di Hyde Park, New York.

Undang-Undang Arsip Kepresidenantahun 1978 menyatakan bahwa semua properti arsip presiden dan wakil presiden dari pemerintahan federal, dengan "penyimpanan, kontrol, dan preservasi" arsip didelegasikan ke Arsip Nasional ketika seorang panglima meninggalkan kantornya.

Ini berarti jutaan arsip harus dipindahkan dari Gedung Putih ke Arsip Nasional sebelum Obama menyelesaikan masa jabatannya. Bahan-bahan fisik tersebut akan berangkat dari Washington ke penyimpanan sementara di sebuah

Gedung Putih memindahkan arsip Obama, termasuk e-mail, ke Arsip Nasional. Arsip itu akan sampai tujuan di Perpustakaan Obama di Chicago

gudang yang lebih besar dan aman di daerah Chicago, sebelum akhirnya dipindahkan ke perpustakaan kepresidenan Obama, yang dijadwalkan akan didirikan di Kota South Side.

Dalam pemerintahan masa lalu, serah terima ini melibatkan truk-truk beroda 18—yang ditarik langsung ke Portico Selatan Gedung Putih —untuk memuat secara hati-hati boks-boks yang berisi bahan-bahan.

Pemerintahan Ronald Reagan menetapkan sistem katalog komputer yang memungkinkan pejabat dengan cepat mengakses arsip yang mereka butuhkan sementara presiden tetap di kantor.

Karena perpustakaan Reagan terletak di seluruh negeri di Simi Valley, California, pesawat kargo militer digunakan, untuk mengemas semua arsip dan mengosongkannya di pangkalan udara di California Selatan. Truk-truk yang dikawal oleh polisi memindahkan arsip di tempat penyimpanan.

Termasuk yang dilepaskan: puluhan ribu hadiah yang telah diterima oleh Obama selama lebih dari delapan tahun di kantornya, yang seperti halnya dokumen dan arsip, secara resmi tetap dalam “kepemilikan, kepunyaan, dan kontrol secara penuh” dari pemerintah.

Di masa Obama, hadiah-hadiah itu mencakup jutaan dolar dalam bentuk perhiasan dari keluarga kerajaan Saudi, papan selancar dari perdana menteri Australia, dan beberapa

senjata seremonial dari berbagai pemimpin dunia.

Secara resmi, Obama tidak diperkenankan menerima hadiah kecuali hadiah tersebut kecil dan murah. Namun, protokol diplomatik melarang dia untuk menolak pemberian jubah panjang dari seorang pangeran Saudi.

Kecuali jika Obama bersedia untuk mengeluarkan uang sebesar \$40,000 untuk jubah tersebut, maka jubah itu tetap properti pemerintah AS, yang dikemas bersama dengan arsip lainnya dan dikirim ke Arsip Nasional.

Beberapa hadiah tetap ada di Gedung Putih – seperti Meja Resolusi (meja kepresidenan) yang terletak di Ruang Oval, yang merupakan hadiah dari Ratu Victoria. Sebagian besar (termasuk, mungkin jubah itu) dikemas dan disimpan dengan hati-hati sebagaimana perawatan museum oleh staf Arsip Nasional.

Setiap pemerintahan dengan sendirinya menghadapi jenis arsip baru yang harus dikatalogisasi dan disimpan untuk anak-cucu. Pemerintahan Reagan adalah yang pertama menggunakan e-mail. Pemerintahan

Bill Clinton mengembangkan website dengan kesederhanaan era tahun 1990-an dan masih bisa dinikmati hingga hari ini.


Apa yang terjadi dengan tweets?

Di era Obama, muncul media sosial—yang secara alami, sebuah ephemeral singkat pada saat waktu tertentu—berarti cara-cara baru untuk melestarikan arsip.

Pada hari Senin (7 November 2016), perwakilan kepala kantor digital Gedung Putih menulis bahwa semua posting media sosial pemerintahan -- “Dari *tweets* hingga *snaps*” —akan disimpan untuk anak-cucu.

“Semua bahan kami publikasikan dan dilestarikan oleh (Arsip Nasional) seperti pemerintahan sebelumnya telah dilakukan dengan arsip mereka mulai dari catatan tulisan tangan hingga faks sampai email,” pejabat, Kori Schulman, menulis dalam sebuah posting di website Gedung Putih.

Ia juga mengatakan bahwa pengelolaan twitter Presiden Obama, @POTUS, akan secara otomatis ditransfer ke penggantinya, tetapi tweets miliknya sendiri tetap dikelola oleh Obama @POTUS44. Arsip akun-akun serupa akan dimasukkan di Instagram dan Facebook. Gedung Putih juga mengatakan akan membuat semua konten media sosial mereka tersedia dalam file yang dapat diunduh. (BB)



Rayi Darmagara

MENEGAKKAN REGULASI BIDANG KEARSIPAN

Beberapa waktu lalu, dalam focus group discussion ‘Penyusunan Program dan Strategi Reformasi Regulasi dalam Rangka Memperkuat Substansi dan Operasionalisasi UU Nomor 12 Tahun 2011’ yang digelar di Hotel Rancamaya, Bogor, Rabu-Jumat (26-28/10/2016) yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, didapat sebuah kesimpulan bahwa Indonesia merupakan negara dengan predikat sudah sampai level obesitas peraturan, Kurang lebih 62 ribu peraturan tersebar di berbagai instansi sehingga membelenggu percepatan pembangunan.

Adagium Indonesia adalah rimba belantara hukum mungkin benar adanya. Salah satu bukti berdasarkan FGD tersebut yaitu adanya ribuan peraturan yang bertebaran di berbagai instansi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Bagaimana dengan peraturan di bidang kearsipan? Jelas bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan memberikan kewenangan bagi ANRI untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan nasional.

ANRI sebagai corong Regulasi

bidang Kearsipan Nasional

Refleksi Indonesia sebagai rimba belantara hukum barangkali juga dapat kita rasakan dalam peraturan bidang kearsipan, paling tidak proses transformasi dari pemerintahan daerah dan lembaga negara dalam pengaturan internal di lembaganya mengalami distorsi peraturan mana yang menjadi acuan. Keberadaan peraturan kementerian lain yang mengatur tata naskah contohnya, dualisme pengaturan di pemerintah pusat membuat pemerintahan daerah baik provinsi/kabupaten dan kota serta lembaga negara menjadi bingung dalam menetapkan peraturan ditingkat internal, belum lagi penggunaan tata naskah dinas dilingkup kementerian dan lembaga pemerintah, jika terdapat peraturan lain yang menjadi acuan, maka kebingungan peraturan akan muncul, dan pastinya menimbulkan ketidak pastian hukum.

Dualisme dimaksud adalah terdapatnya peraturan lain selain Peraturan Kepala ANRI sebagai acuan dalam menetapkan instrumen penyelenggaraan arsip dinamis yang meliputi tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi

keamanan dan akses arsip. Padahal konstruksi hukum berbicara atribusi kewenangan (pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan) terhadap kearsipan berasal dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Jelaslah bahwa Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatakan bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.

Kewenangan atribusi yang telah dimiliki ANRI dalam bidang kearsipan, kemudian didelegasikan (dilakukan pelimpahan suatu wewenang) kepada Kepala ANRI melalui Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyatakan bahwa tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh

Kepala ANRI. Patut digaris bawahi dalam kewenangan pembentukan perundang-undangan bahwa terdapat kalimat pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.

Dalam hal kementerian lain menyusun pedoman tata naskah dinas dan/atau klasifikasi arsip yang dijadikan pedoman oleh lembaga pencipta, maka perlu dipertanyakan landasan yuridis atau kewenangan atribusi dan delegasi dari peraturan mana kementerian tersebut mengeluarkan pedoman dimaksud. Jelaslah bahwa salah satu penyebab lahirnya tumpang tindih peraturan, dualisme pengaturan dan obesitas peraturan juga muncul dari kementerian/lembaga yang tidak memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan tersebut, dibidang kearsipan, siapa pun kementerian/lembaga selain ANRI yang menetapkan peraturan tentang kearsipan berskala nasional memberi andil terhadap rimba belantara hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan batasan terhadap peraturan apa saja yang perlu dibentuk melalui pengaturan pada dasar hukum yang harus memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Coba tanyakan kepada kementerian atau lembaga lain yang menetapkan peraturan tentang tata naskah dinas dan/atau klasifikasi arsip dasar aturan hukum yang lebih tinggi mana yang memerintahkan membentuk? Dapat dipastikan bahwa jawabannya tidak ada, lalu untuk apa membentuk?

Dalam adagium hukum terdapat asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih

tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), Dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, pasti tidak terlepas dari Teori *Stufenbau* karya Hans Kelsen (selanjutnya disebut sebagai "Teori *Aquo*"). Hans Kelsen dalam Teori *Aquo* membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan, misalnya ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah (PP) dengan undang-undang, maka yang digunakan adalah undang-undang karena undang-undang lebih tinggi derajatnya. Adagium hukum tersebut dapat pula kita terapkan terhadap peraturan kementerian lain dibidang tata naskah dengan uji hierarki bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Politik Hukum Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Politik hukum merupakan aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara - cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat, dari segi perundang-undangan yang sifatnya tertulis, berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Dalam bidang kearsipan, perlu mencari jalan keluar terhadap permasalahan ini. Salah satu cara adalah proses harmonisasi penyusunan peraturan, artinya Produk Hukum baik tingkat daerah maupun tingkat pusat dalam pembentukannya perlu koordinasi dengan ANRI, sebagai contoh untuk

pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menetapkan Peraturan Daerah dibidang kearsipan secara tertulis mencantumkan rumusan delegasi "tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI".

Dua frasa Kepala Daerah dan "Pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI" merupakan kunci dalam rangka menghindari carut marut pedoman apa yang menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah, rumusan ini membatasi bahwa hanya Perka ANRI yang menjadi acuan Kepala Daerah dalam menyusun tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Jadi

Untuk pemerintah pusat baik kementerian atau lembaga pemerintah, maka terapkan saja secara utuh Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dengan ketentuan harus berdasarkan "Pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI".

Jika kesadaran pembentuk peraturan perundang-undangan mengacu pada frasa "Pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI", secara otomatis peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga lain akan menjadi sia-sia dan tidak pernah diterapkan, semua akan mengacu pada Peraturan Kepala ANRI.

Sedikit menilik pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau

penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Artinya, wewenang harus dibuat oleh alat (organ) yang berkuasa (bevoegd) membuatnya. Dalam pembentukan kehendak dari alat negara yang mengeluarkan suatu pengaturan, tidak boleh ada kekurangan yuridis, kekurangan yuridis dapat disebabkan karena salah kira (dwaling), paksaan (dwang), dan tipuan (bedrog). Pengaturan yang dimaksud adalah harus diberi bentuk yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan harus juga memperhatikan cara/prosedur pembuatannya. Isi dan tujuan dari ketetapan juga harus sesuai dengan isi dan tujuan dalam peraturan dasarnya. Apabila terdapat kekurangan yuridis akan berimplikasi batal.

Dalam konteks Hukum Tata Negara, terdapat 3 (tiga) teori tentang teori kebatalan, yakni batal mutlak, batal demi hukum, dan dapat dibatalkan.

Ketiga teori ini memiliki perbedaan berdasarkan 2 (dua) aspek, yakni: (1) Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan, yakni akibat-akibat hukum yang mengikuti jika terjadi pembatalan. Hal tersebut adalah konsekuensi logis yang muncul dan tidak dapat dihindari (2) Lembaga atau Pejabat yang berhak menyatakan batal, yakni mengenai kewenangan pembatalan dalam arti pejabat yang berhak untuk melakukan proses pembatalan tersebut.

Menurut akademisi hukum yang coba penulis wawancara, jika satu peraturan dengan jenis yang sama dikeluarkan oleh instansi yang berbeda maka dapat disimpulkan “terdapat perbuatan yang tidak didasarkan pada wewenangnya, hal ini dapat diindikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang”. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

“ Akhirnya mari bersama-sama lepaskan ego sektoral dalam pembentukan peraturan agar tidak menambah obesitas hukum di negara kita ”

Administrasi Pemerintahan disebutkan 3 jenis penyalahgunaan wewenang yaitu melampaui, mencampuradukan dan bertindak sewenang-wenang. Apabila dianalisis lebih dalam, maka dengan dikeluarkannya peraturan kementerian lain dengan obyek pedoman Tata Naskah misalkan, dikategorikan sebagai melampaui wewenang, sehingga berimplikasi batal demi hukum. Keputusan Batal demi hukum dapat dilakukan oleh pihak eksekutif maupun yudikatif.

Jika yang membatalkan adalah pihak eksekutif, maka dapat dikategorikan sebagai sengketa kewenangan yang dijelaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa (1) B a d a n dan/atau Pejabat Pemerintahan mencegah terjadinya Sengketa Kewenangan dalam penggunaan Kewenangan. (2) Dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan, kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan berada pada antar atasan Pejabat Pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan maka

kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sepanjang tidak merugikan keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup (4) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian sengketa kewenangan di lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden.

Berdasarkan pada aturan tersebut, maka perlu dilakukan koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan yang diputuskan terakhir oleh Presiden. Adapun jika diputuskan oleh yudikatif, maka obyeknya adalah pengaturan di bawah Undang-Undang, maka lembaga yang berwenang untuk membatalkan adalah Mahkamah Agung yaitu menguji sah tidaknya suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi.

Jika melihat dari data obesitas terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, dimana peraturan menteri salah satu porsi terbanyak dalam menciptakan belantara hukum, ditambah dengan pendapat Dirjen Peraturan Perundangan (PP) Kemenkum HAM RI, bahwa “peraturan itu bermasalah karena regulasi-regulasi itu menimbulkan tumpang tindih dan konflik kewenangan antar kementerian atau antar lembaga”, sehingga agenda terdekat Kemenkum HAM RI yang akan segera merampingkan 62 ribu Peraturan di Indonesia dapat pula segera menyentuh refleksi dualisme peraturan dibidang kearsipan tadi, akhirnya mari bersama-sama lepaskan ego sektoral dalam pembentukan peraturan agar tidak menambah obesitas hukum di negara kita.



Lokananta

Atik Fara Noviana

PENDIGITALISASIAN ARSIP MUSIK LOKANANTA SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN MEMORI KOLEKTIF BANGSA INDONESIA

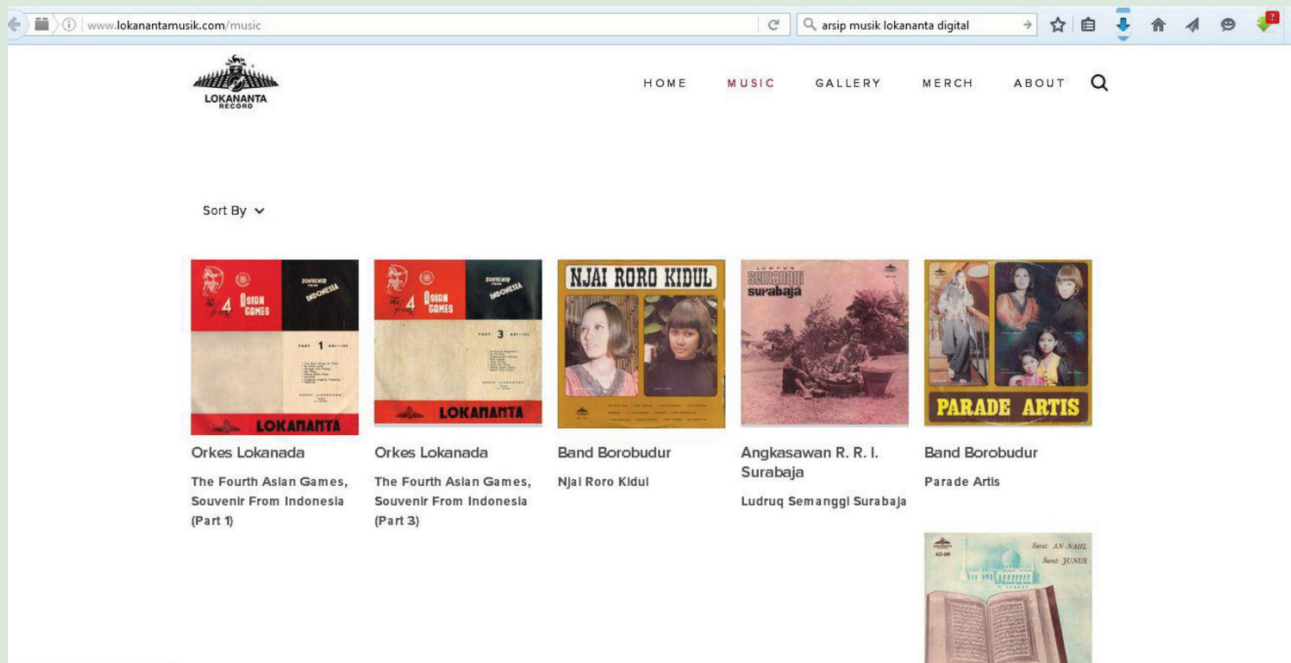
Lokananta menyimpan arsip bentuk khusus seperti music daerah, Orkes Melayu dan Keroncong hingga musik Pop dan Jazz bahkan rekaman pidato Bung Karno, yang kesemuanya itu merupakan harta Bangsa Indonesia yang berharga dan dapat dijadikan bukti fisik akan sejarah musik dan budaya (Purba, 2015). Lokananta sampai saat ini sudah memiliki koleksi lebih dari 5000 lagu rekaman daerah dari seluruh Indonesia (*Ethnic/World Music/Folklor*) dan lagu-lagu pop lama termasuk diantaranya lagu-lagu kroncong. Koleksinya antara lain terdiri musik gamelan Jawa, Bali, Sunda, Sumatera Utara (batak) dan musik daerah lainnya serta lagu lagu folklore ataupun lagu rakyat yang tidak diketahui penciptanya. Rekaman gending karawitan gubahan dalang kesohor Ki Narto Sabdo, dan karawitan Jawa Surakarta dan Yogya merupakan sebagian dari koleksi yang ada di Lokananta. Tersimpan juga master lagu berisi lagu - lagu dari penyanyi legendaris seperti Gesang, Waldjajah, Titiek Puspa, Bing Slamet, dan Sam Saimun (Irwanuddin, 2015).

Terlihat jelas bahwa Lokananta

menyimpan harta yang sangat berharga bagi Bangsa Indonesia. Terlihat dari arsip-arsip musik yang dihasilkan dan disimpan Lokananta yang dimulai dari tahun 1956. Dari decade perkembangan musik yang ada di Lokananta dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung arsip musik ini menyimpan informasi-informasi akan memori kolektif masa lalu bangsa Indonesia. Memori kolektif Bangsa Indonesia yang terekam dalam arsip telah merelasikan peristiwa dan kejadian pada masa lalu sebagai sumber informasi, acuan, dan pembelajaran bagi masyarakat pada masa kini guna menuju dan meraih masa depan yang lebih baik (Azmi, 2013). Memori yang terdapat dalam arsip musik ini bisa menggambarkan sebuah memori yang terjadi pada masa dimana musik tersebut tercipta. Arsip musik tidak saja memberikan informasi tentang perkembangan suatu musik dari masa ke masa, tidak saja memuat informasi terkait penyanyi dari era tahun sebelum reformasi hingga saat ini, tetapi sebenarnya ada makna akan informasi yang terekam dari sebuah arsip musik.

Profil Lokananta

Lokananta adalah sebuah perusahaan rekaman milik Negara yang didirikan pada tanggal 29 Oktober 1956 di Jalan Achmad Yani Surakarta. Pada awal didirikan, Lokananta adalah sebuah institusi yang berstatus sebagai pabrik piringan hitam dengan administrasi jawatan yang langsung di bawah jawatan RRI pusat Jakarta. Lokananta pada saat itu mengemban tugas untuk memproduksi sekaligus mendistribusikan materi siaran untuk Radio Republik Indonesia dalam piringan hitam dan tidak dijual untuk umum (Muadz, 2015). Hal ini dilakukan karena resahnya melihat perkembangan lagu pada saat itu yang didominasi dengan lagu-lagu barat pada Radio Republik Indonesia. Dengan berkembangnya zaman, Lokananta berubah menjadi label rekaman dengan spesialisasi pada lagu daerah, pertunjukan kesenian, serta beberapa arsip rekaman RRI. Lambat laun Lokananta dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang mengemban tugas dalam melestarikan arsip-arsip audio seperti arsip musik yang dulu pernah diproduksi sendiri oleh Lokananta. Selain koleksi-koleksi mengenai lagu-lagu daerah,



Tampilan website Lokananta

Lokananta juga menyimpan rekaman penting sejarah bangsa Indonesia seperti rekaman lagu kebangsaan “Indonesia Raya” versi instrumental gubahan Jos Cleber dengan durasi selama tiga stanza, serta pidato Ir. Soekarno saat pembukaan Konferensi Asia Afrika pertama di Bandung pada tahun 1955 (Sumber dari <http://www.lokanantamusik.com/about>).

Dari sedikit sejarah mengenai Lokananta di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya Lokananta merupakan tempat penyimpanan arsip bentuk khusus yang menyimpan arsip-arsip musik baik musik daerah, Orkes Melayu dan Keroncong hingga musik Pop dan Jazz bahkan rekaman pidato Bung Karno, yang kesemuanya itu merupakan harta Bangsa Indonesia yang berharga dan dapat dijadikan bukti fisik akan sejarah musik dan budaya (Purba, 2015). Lokananta sampai saat ini sudah memiliki koleksi lebih dari 5000 lagu rekaman daerah dari seluruh Indonesia (*Ethnic/World Music/Folklor*) dan lagu-lagu pop lama termasuk diantaranya lagu-lagu kroncong. Koleksinya antara antara lain terdiri musik gamelan Jawa, Bali, Sunda, Sumatera Utara (batak) dan musik daerah lainnya serta lagu lagu

folklore ataupun lagu rakyat yang tidak diketahui penciptanya. Rekaman gending karawitan gubahan dalang kesohor Ki Narto Sabdo, dan karawitan Jawa Surakarta dan Yogya merupakan sebagian dari koleksi yang ada di Lokananta. Tersimpan juga master lagu berisi lagu - lagu dari penyanyi legendaris seperti Gesang, Waldjinh, Titiok Puspa, Bing Slamet, dan Sam Saimun (Irwanuddin, 2015).

Perpustakaan Digital Musik sebagai Wujud Preservasi Arsip Musik

Pendigitalisasian merupakan salah satu upaya preservasi yang dilakukan Lokananta. Preservasi arsip dapat dikatakan sebagai upaya untuk keberlangsungan hidup material arsip yang terpilih untuk memastikan akses untuk waktu yang lama (Forde, 2007). Selain itu pendigitalisasian arsip musik ini juga bertujuan untuk memelihara memori kolektif yang ada dalam arsip musik. Tidak dapat terbantahkan jika arsip musik merupakan salah satu arsip yang mempunyai nilai informasi yang vital. Karena sekarang ini tidak saja arsip tekstual yang mempunyai fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Namun arsip audio visual contohnya

juga dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat umum. Diharapkan dengan adanya upaya pendigitalisasian ini, informasi yang terkandung dalam arsip musik Lokananta dapat tetap tersimpan dengan baik dan berguna untuk informasi bagi generasi mendatang.

Lokananta melakukan pendigitalisasian arsip dengan mendigitalkan arsip musik dari bentuk piringan hitam, pita master ke bentuk computer. Pengelola Lokananta memindahkan isi informasi yang ada di dalam piringan hitam ke dalam komputer. Kemudian tidak hanya itu, pengelola Lokananta beserta para pegiat musik Surakarta dari mahasiswa Institut Seni Yogyakarta mencoba membuat sebuah perpustakaan digital yang memuat arsip-arsip musik Lokananta. Perpustakaan digital ini dapat diakses online oleh masyarakat umum.

Gambar di atas merupakan website perpustakaan digital yang diluncurkan oleh Lokananta. Perpustakaan digital tersebut berisi mengenai lagu-lagu yang telah di digitalkan oleh pihak Lokananta. Semua lagu yang berada dalam website perpustakaan digital tersebut dalam dinikmati secara

langsung oleh masyarakat luas. Hal ini merupakan salah satu upaya Lokananta untuk tetap melestarikan musik bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun arsip musik Lokananta merupakan asset yang dimiliki bangsa Indonesia. Diharapkan dengan adanya perpustakaan digital ini, masyarakat Indonesia lebih mengetahui akan keberadaan Lokananta sebagai organisasi yang menyimpan arsip musik dari tahun 1956. Karena bagaimanapun arsip musik mempunyai beberapa peran atau fungsi tertentu bagi bangsa Indonesia.

Beberapa arsip musik yang sudah didigitalisasikan oleh pihak Lokananta antara lain perpustakaan digital Lokananta telah mengunggah sebanyak 60 album rilisan Lokananta sejak tahun 1956. Beberapa diantaranya adalah Message of H. E. *President Soekarno on The Opening Ceremony of The First Asian-Africa Journalist's Conference on April 24, 1963* dan lagu "Indonesia Raya" versi instrumental dengan sampul lirik tiga stanza. Selain itu juga telah diunggah album *The Fourth Asian Games, Souvenir From Indonesia* yang menjadi buah tangan atlet-atlet yang berlaga di ajang Asian Games tahun 1962 di Jakarta.

Fungsi Arsip Musik Lokananta

Arsip tidak saja berfungsi sebagai bukti hukum, alat pengambilan keputusan, serta dokumen dari masa lalu. Namun arsip mempunyai fungsi yang begitu luar biasanya apalagi di era postmodern seperti sekarang ini. Fungsi arsip mengalami perkembangan yang lebih signifikan dari papa hanya sekedar sebagai bukti hukum. Joan Schwartz and Terry Cook dalam Brown (2013) berpendapat bahwa arsip merupakan sebuah rekod yang memiliki kekuatan atas bentuk dan arah dari sebuah sejarah, memori kolektif, dan identitas nasional melebihi bagaimana kita tahu akan diri kita sendiri baik sebagai individu, kelompok dan masyarakat.

Begitu juga arsip musik yang disimpan oleh Lokananta. Arsip musik ini tidak sekedar berisi mengenai lagu-lagu dari berbagai daerah, atau hanya berisi lagu yang tanpa memiliki nilai

informasi vital. Nyatanya arsip musik Lokananta ini memiliki fungsi atau peran bagi masyarakat umum

Arsip Musik sebagai Potret Perkembangan Musik di Indonesia

Informasi yang ada dalam arsip musik Lokananta dapat dikatakan sebagai potret perkembangan musik di Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya, suku, dan ras yang kesemuanya mempunyai tradisi budaya masing-masing. Tidak terkecuali dengan jenis lagu yang ada di setiap daerah di Indonesia. Kemudian sudah dapat dipastikan bahwa musik yang ada di Lokananta dari mulai tahun 1956 dapat memberikan informasi terkait perkembangan musik di Indonesia kepada generasi mendatang. Arsip musik yang tersimpan di Lokananta dapat dikategorikan dalam 3 periode, dimana periode orde lama, orde baru, serta generasi reformasi. Dari berbagai musik yang tersimpan di Lokananta, bukan hal yang tidak mungkin untuk kita mengetahui perkembangan musik seperti apa yang ada di tiap periode tersebut.

Arsip Musik Lokananta sebagai Bahan Bukti Hukum

Arsip juga dapat dijadikan sebagai bahan bukti, baik bahan bukti untuk perseorangan, organisasi, ataupun bangsa. Kasus yang cukup menghebohkan terjadi pada akhir tahun 2008, Dimana lagu tradisional dari Maluku yang berjudul "*Rasa Sayange*" di klaim oleh Negara lain. Kasus ini menjadi polemik yang berkepanjangan. Tetapi Lokananta menunjukkan perannya dengan menunjukkan bukti berupa hasil rekaman lagu tersebut yang pada saat itu diciptakan oleh Paulus Pea dan dibawakan ulang oleh Orkes Lokanada di bawah arahan B.Y. Supardi tahun 1962 dan diproduksi di sebuah studio kota Solo dan telah dipublikasikan dalam bentuk vinyl atau piringan hitam untuk kebutuhan cinderamata Asian Games IV di Jakarta pada bulan Agustus 1962 (www.tempo.co). Disinilah sebenarnya peran arsip yang kebanyakan masih diabaikan kepentingannya oleh masyarakat umum. Padahal begitu

besar informasi yang tertuang dalam sebuah arsip, bahkan dapat menjadi bahan bukti hukum.

Arsip Musik Lokananta sebagai Produk Budaya Bangsa Indonesia

J.J. Honigman dalam Koentjaraningrat (1990) juga mengatakan bahwa terdapat tiga wujud dari kebudayaan: (1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya; (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat; (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (artefak). Terlihat bahwa musik merupakan hasil kesenian masyarakat Indonesia yang mengandung sebuah informasi yang dituangkan melalui lirik lagu. Menurut Hidayat (2014) bahwa musik adalah salah satu media ungkapan kesenian, musik mencerminkan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Di dalam musik terkandung nilai dan norma-norma yang menjadi bagian dari proses enkulturasi budaya, baik dalam bentuk formal maupun informal. Musik sendiri memiliki bentuk yang khas, baik dari sudut struktural maupun jenisnya dalam kebudayaan.

Pada akhirnya, arsip tidak saja berbentuk tekstual seperti biasanya, namun arsip juga dapat berupa audio visual dalam hal ini khususnya arsip musik Lokananta. Arsip musik Lokananta mempunyai fungsi yang begitu luar biasa bagi bangsa Indonesia, namun belum begitu besar kepedulian masyarakat akan Lokananta itu sendiri. Disinilah Lokananta diharuskan mengembangkan fungsinya untuk dapat dilihat oleh masyarakat luas. Salah satu yang sudah dilakukan Lokananta yaitu dengan pendigitalisasian arsip musik tersebut. Diharapkan informasi yang ada di dalam arsip musik tersebut dapat digunakan sebagai berbagai sumber untuk masa yang akan datang.



Sumantri

PEMANFAATAN ARSIP DATA CITRA SATELIT LINGKUNGAN DAN CUACA LAPAN SEBAGAI BAHAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Perkembangan pesat teknologi antariksa mendorong berkembangnya kegiatan aplikasi teknologi ini bagi kesejahteraan umat manusia di muka bumi, khususnya dalam pemanfaatan antariksa sebagai daerah tanpa gaya berat dan daerah hampa udara. Pengamatan muka bumi, samudra, atmosfer dan interaksi ketiganya dengan satelit berlangsung secara kontinyu, cepat dan selalu dapat diperbaharui dengan segera.

Perolehan arsip data citra satelit dapat diterapkan pada berbagai bidang kegiatan dari peramalan cuaca, prediksi siklon, pertanian, perikanan, eksplorasi migas dan mineral, pengamatan hutan tropis, pengembangan wilayah, mitigasi bencana alam sampai kegiatan-kegiatan bidang hankam. Arsip citra satelit mulai dikenal ketika pada tahun 1957-1958 dicanangkan sebagai tahun *Internasional Geophysical Year* (IGY) dimana untuk pertama kalinya

negara-negara di dunia melakukan penyelidikan lingkungan alam secara simultan dan terkoordinasi. Hasil kegiatan IGY sangat spektakuler, sebuah satelit milik Uni Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957 bernama SPUTNIK-1 meluncur ke ruang angkasa disusul kemudian pada tanggal 1 Februari satelit bernama Explorer-1 milik Amerika Serikat.

Keberhasilan teknologi antariksa tersebut, disusul oleh pengorbitan para kosmonot dan astronot untuk pertama kalinya begitu memukau dan merangsang imajinasi masyarakat dengan demam antariksa. Demam antariksa di Indonesia ditandai dengan adanya "Gandrung Peroketan" serta munculnya kelompok-kelompok yang bereksperimen membuat roket baik dikalangan ABRI maupun mahasiswa. Sebagai tanggapan terhadap perkembangan jaman sekaligus mencari jalan bagi dimulainya aktivitas keantariksaan yang sistematis maka

Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia membentuk Panitia Astonautika yang disahkan pada 14 Desember 1962. Hal ini untuk menepis adanya tanggapan selama program IGY Indonesia dimasukkan sebagai Negara "Black Area" daerah hitam tanpa data ilmiah.

DEPANRI selanjutnya mengusulkan dibentuknya lembaga keantariksaan yang kemudian kita kenal dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional-LAPAN pada tanggal 27 Nopember 1963, guna mengejar momentum program International Quiet Sun Year (IQSY) melalui Proyek "S" (Proyek Roket Ionosfer/Angkasaluar) dalam peluncuran roket Kartika-1 tahun 1964 dapat merekam sinyal data satelit cuaca TIROS-1 milik Amerika Serikat. Pada tahun 1965 LAPAN meluncurkan roket-roket ilmiah KAPPA mencapai ketinggian 364 km, arti penting



Fasilitas Stasiun Bumi LAPAN di Pekayon, Rumpin, dan Pare-Pare

keberhasilan memperoleh data-data ilmiah yang disumbangkan pada program IQSY 1964-1965 adalah menepis anggapan Indonesia sebagai negara “black area.”

Pemanfaatan arsip data satelit lingkungan dan cuaca di Indonesia.

Pada April tahun 1961 satelit TIROS-1 berhasil diluncurkan dengan misi melakukan pemetaan awan dengan menggunakan sensor yang bekerja pada daerah spectrum optic. Dalam perkembangannya lebih lanjut, sampai dengan saat ini satelit ini bukan sebagai satelit meteorology akan tetapi sebagai satelit observasi lingkungan, baik di darat, di laut maupun di udara bahkan sebagai *Data Collection System and Rescue* (SAR). Dengan dimulainya repelita I pada tahun 1967, maka di LAPAN dilakukan reaktivasi kegiatan dengan penekanan kepada hal-hal yang langsung mendukung pembangunan nasional. Kegiatan ini dikenal sebagai pemanfaatan antariksa (space application) yang bertujuan untuk memanfaatkan kemajuan

negara-negara maju di dalam satelit aplikasi terutama untuk observasi dan pemantauan lingkungan serta cuaca, penginderaan jauh untuk sumber daya alam, pesisir, dan telekomunikasi yang umumnya menjadi prioritas negara-negara berkembang.

Supaya dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari data satelit lingkungan dan cuaca, pada tahun 1970 LAPAN membangun Stasiun Bumi APT (*Automatic Picture Transmission*) di Pekayon Jakarta dan kemudian di Biak, Irian Jaya. Data dari satelit lingkungan dan cuaca yang diterima distasiun bumi pekayon mempunyai dua macam kegunaan yaitu untuk kepentingan meteorologi dan untuk kepentingan non-meteorologi seperti untuk pengukuran indeks vegetasi, untuk pemantauan kekeringan, kebakaran hutan, penyebaran abu vulkanik dan penentuan daerah konsentrasi ikan.

Fasilitas-fasilitas

Stasiun Bumi Satelit Lingkungan

dan Cuaca LAPAN di Pekayon Jakarta mempunyai kemampuan menerima secara langsung data dari satelit *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) yang berorbit polar dan satelit *Geostionery Meteorological Satellite* (GMS) yang berorbit geostasioner pada posisi 140 derajat bujur timur. Dari satelit NOAA, stasiun Bumi Satelit Lingkungan dan Cuaca menyimpan arsip data dari lima jenis sensor utama yang masing-masing mempunyai kegunaan sendiri-sendiri. Adapun arsip data dari lima jenis sensor tersebut yakni (1) Mengenai liputan awan, temperature permukaan air laut, liputan debu vulkanik, indeks vegetasi, kebakaran hutan, dan sebagainya dengan sensor AVHRR (*Advanced Very High Resolution Radiometer*) (2) Mengenai profil temperature atmosfer vertical, profil kelembaban atmosfer vertical dan kelembaban atmosfer dengan sensor TOVS (*Tiros Operational Vertikal Sounders*) (3) Mengenai partikel energy tinggi yang memasuki atmosfer, dengan sensor SEM (*Space*



Penyimpanan Arsip Media Baru Citra Satelit

Environment Monitor) (4) Data cuaca actual di suatu tempat tertentu dengan sensor pada DCS (*Data Collection System*) melalui satelit dapat diterima di stasiun Bumi (5) Informasi untuk kepentingan *Search and Rescue* (SAR) melalui sensor SARSAT (*Search and Rescue satelit Aided Tracking*)

Untuk mengolah data dari kelima sensor tersebut diperlukan prosesor multiguna yang mampu mengolah seluruh informasi secara tepat, yaitu sensor VAX-11/780 yang digunakan dalam system pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan data visual dan data-data digital.

Stasiun Bumi Satelit Cuaca di Biak

Stasiun ini dapat menerima data satelit NOAA dengan baik pada siang dan malam hari. Data ini mencakup wilayah Indonesia Bagian Timur mulai dari 120 derajat bujur timur ke timur. Data GMS dapat diperoleh dengan baik pada siang hari dan malam hari sebanyak 8 kali dan luas bidangnya liputannya kurang lebih seperempat permukaan bumi, dan dapat diolah dengan sistem HRPT (*High Resolution Picture Transmission*).

Sarana Layanan Informasi Berbasis Satelit Lingkungan dan Cuaca

Kemajuan teknologi penginderaan jauh awal tahun 70-an hingga 80-an memicu perkembangan manajemen informasi lingkungan, utamanya dipengaruhi oleh peluncuran satelit penginderaan jauh LANDSAT, SPOT, MTSAT, FENGYUN dll yang menyediakan arsip data lingkungan dan sebagai pengelola manajemen lingkungan.

Sistem Informasi Lingkungan (SIL) menyediakan sebuah teknologi yang menyajikan informasi lingkungan secara terstruktur yang dikelola dan disediakan untuk para perencana dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh: Sistem Informasi Mitigasi Bencana Alam (SIMBA, <http://inderaja.lapan.go.id>) sistem ini menyediakan informasi tentang bencana alam di Indonesia.

Manfaat SIL adalah menyediakan informasi yang otentik dan layak yang terkait lingkungan dan sangat berguna bagi pengambil kebijakan dan perencanaan tata kelola lingkungan. Arsip data penginderaan jauh yang

setiap hari direkam distasiun bumi parepare, dapat dilakukan pembaharuan data yang terekam pada suatu daerah yang sama dalam waktu yang berbeda dan dilakukan secara terintegrasi dalam satu system. Informasi yang disajikan antara lain tentang (a) Proses pengolahan limbah dan infoemasi lainnya tentang pencemaran udara, debu, limbah cair dan limbah padat (b) Pemetaan luas kerusakan lingkungan (c) Sebagai pusat data pengelolaan kerusakan lingkungan (d) Sebagai pusat dokumentasi informasi lingkungan (e) Penataan kembali lingkungan yang rusak.

System Informasi Lingkungan dapat digunakan untuk melihat keadaan lingkungan, membuat perencanaan, masukan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-su lingkungan. Pada akhirnya masyarakat mampu mengambil keputusan yang tepat terkait dengan penggunaan arsip data sumberdaya alam dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Ringga Arif WH

DI ANTARA TUMPUKAN JEJAK

(MENAPAK JEJAK MEWUJUDKAN REVOLUSI MENTAL)

S emburat langit kemerah-merahan di arah timur menandakan fajar telah tiba. Mentari bersinar pelan dari balik pegunungan. Ayam jago berkokok riang, membangunkan penduduk yang sebagian masih terlelap. Desa yang asri banyak ditumbuhi pepohonan rindang, pegunungan menjadi tembok besar yang seolah melindungi perkampungan dari marabahaya. Sawah dan ladang terhampar luas, menyejukkan mata bagi yang memandang. Tirtorejo, itulah nama desa tersebut. Dari namanya saja, orang pasti akan bisa mengira-ira arti dari namanya.

Mbah Hardi berjalan menuju sawahnya, musim tanam sudah dimulai, sawah perlu diolah sedemikian rupa agar menghasilkan panen yang mencukupi. Cangkul di pundaknya, sabit terselip di celana belakangnya.

Meskipun sudah menginjak usia kepala delapan, fisik Mbah Hardi masih terlihat kuat, berjalan di *galengan*³ yang berdekatan dengan kalen. Dari keempat anaknya, ketiganya merantau tidak tinggal bersama di desa lagi. Yang merantau, dua sudah menikah dan satunya masih lajang. Sementara, anak bungsu yang baru menginjak dewasa masih tinggal bersama Mbah Hardi dan istrinya. Mbah Hardi memang tidak mau bergantung pada anaknya, meskipun anaknya di perantauan sudah memintanya agar tidak bekerja di sawah lagi, beristirahat di rumah, dia tetap bersikeras pergi ke sawah. Baginya sawah bukan sekadar seenggok tanah yang diam karena dari tanah sawah itu tumbuh padi, palawija yang mencukupi kebutuhan hidupnya selama ini. Di lokasi itu pula, persawahan timur desa, dia mengenang kisah heroik masa lampau yang berjuang mempertahankan kemerdekaan dari tindakan Agresi

Militer Belanda. Dari sekian banyak sahabat sepantaran usianya, tinggal Pardi yang masih hidup. Pardi hidup bersama istrinya, di desa seberang sungai, Desa Tirtoumbul.

Menjelang siang, sekitar jam 11, anaknya, Kasman membawakan rantang berisi makanan untuknya. Sehari-hari Kasman berjualan sembako, membuka warung kecil di depan rumah. Dari kejauhan, dia melihat Kasman yang berjalan mendekatinya.

“Simbok masak apa hari ini, Le?” dia kemudian menepi dari sawah ke arah gubuk kecil yang dibangunnya di bagian barat. Hari ini dia namping¹ dan mopok² sawahnya, memperkuat galengan agar air di sawah tidak merembes keluar sebelum ditanami bibit padi kelak.

“Masak sayur rebung, Pak. Masakan Simbok memang paling enak sedunia,” jawab Kasman sambil

CERITA KITA

memandang wajah bapaknya. Wajah yang sudah menua dan mengerut, rambut yang telah memutih, dan letih yang menyelimutinya. Kasman sangat sayang pada bapaknya. Pernah suatu ketika Kasman meminta bapaknya di rumah saja, menjaga warung, dan Kasman yang menggantikannya di sawah, namun permintaan Kasman itu ditolak Hardi. Sambil makan berdua, dia bercerita tentang kisah perjuangannya bersama penduduk desa.

“Waktu itu Indonesia telah merdeka, namun Belanda rupanya tidak rela wilayah bekas jajahannya lepas dari genggaman. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan, para serdadu Belanda dengan persenjataan modern menyerbu desa ini juga,” tutur Mbah Hardi.

“Penduduk bagaimana, Pak? Banyak yang gugur?” tanya Kasman.

“Iya, Le. Demi tanah air, nyawa pun mereka pertaruhkan, tanpa gentar kami melawan pasukan Belanda yang hendak menancapkan kuku kolonialisme kembali. Dengan beberapa pucuk senjata rampasan dari tentara Jepang kala itu, kami melawan,” terangnya menceritakan pada putra bungsunya itu arti sebuah perjuangan.

“Aku bangga, Pak, pada keberanian dan semangat perjuangan penduduk desa kita ini. Katanya, Pak Dirman juga melewati desa kita ini dalam memimpin perang gerilya?” tanya Kasman penasaran.

“Bapak bertemu langsung dengan Pak Dirman dan beliau menginap semalam di rumah Pak Lurah.

Pak Dirman seorang patriot sejati, meskipun sakit beliau tetap memimpin perjuangan dan selalu mengobarkan semangat bagi kita semua,” jelas Mbah Hardi.

Malam menyelimuti desa, burung hantu yang bertengger di pohon randu bernyayi menyapa penduduk. Gardu di seberang jalan masuk desa nampak ramai, kaum pria terlihat bercengkerama berbincang dengan asyiknya, bertugas ronda menjaga keamanan desa. Mbah Hardi pun tidak ketinggalan, mengenakan jaket dan sarung, dia tak sungkan berkumpul berbaur bersama dengan pria yang lebih muda darinya.

“Perjuangan itu harus dilakukan sepanjang hidup kita, entah apapun pekerjaan kita, dan jangan sampai terlena terhadap kekayaan dan kekuasaan yang sejatinya bisa membelenggu kedaulatan kita,” ujarnya sambil menikmati segelas kopi hitam dan singkong rebus kesukaannya.

“Mbah, dulu peristiwa 10 November 1945 itu bagaimana ceritanya?” tanya Panjul, anak dari Marto sahabatnya yang telah meninggal.

“10 November 1945 memiliki arti penting, Le. Para pejuang berkobar semangatnya, melawan ultimatum tentara sekutu yang diboncengi Belanda agar menyerahkan senjata yang dimiliki dan tunduk menuruti perintah mereka. Kita juga tidak boleh lupa, bahwa ulama dan pemimpin itu saling menguatkan, masing-masing berperan penting. Resolusi Jihad yang dikumandangkan pada 22 Oktober 1945 terbukti mampu menggelorakan

semangat, membakar api perjuangan dan membulatkan tekad hati melawan segala bentuk penjajahan. Kiai Hasyim dan NU menyerukan untuk melakukan perjuangan besar yang bersifat Sabilillah mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia. Orasi besar Bung Tomo, yang suaranya menggelegar itu menggugah kesadaran warga akan arti penting kemerdekaan. Kita bukan cecunguk, bukan kacung, bukan budak, kita manusia merdeka yang bebas menentukan pilihan di tanah air yang merupakan karunia Tuhan. Kalau kalian pernah ke Surabaya, disana ada Hotel Yamato⁴ kala itu arek-arek Surabaya dengan gagahnya merobek kain warna biru pada bendera Belanda yang berkibar, sehingga nampak warna merah dan putih berkibar dengan gagahnya,” jelas Mbah Hardi panjang lebar.

“Oh begitu ya, Mbah. Kalau era globalisasi sekarang menurut Mbah kondisi Indonesia bagaimana?” tanya Karyo yang duduk di sebelah Panjul.

“Sebetulnya kalian sendiri bisa merasakan bagaimana kondisi negeri kita sekarang. Coba tanyakan pada hati kalian, apakah betul kita sudah benar-benar merdeka seutuhnya, merdeka yang sejati? Barang-barang kebutuhan masih banyak yang impor, pembangunan tidak merata, jurang ketimpangan sosial masih lebar, masih sulitnya akses pendidikan dan kesehatan, serta mental bangsa yang kian mengkhawatirkan,” terang Mbah Hardi.

Meskipun usianya sudah sepuh, namun ingatan dan pengetahuannya begitu luas. Dia juga piawai dalam

menyusun dan merangkai kalimat-kalimat membentuk sajak yang indah. Sajak-sajak yang penuh dengan optimisme, kritik sosial dan perjuangan, yang sangat dekat dengan kondisi faktual keseharian. Semua yang ada di gardu itu diajak oleh Mbah Hardi untuk berpikir, merenungkan, mendekonstruksikan kembali makna kemerdekaan yang sejati. Menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan, suka menolong sesama, bertindak dengan arif, menjadikan sosok Mbah Hardi sebagai panutan dan tempat bertanya serta berkeluh kesah warga Desa Tirtorejo. Mbah Hardi juga kerap kali membesarkan hati, menguatkan hati warga yang sedang dirundung kesedihan dan kemalangan.

Selasa Legi, ba'da Isya, bertempat di Balai Desa Tirtorejo diadakan pertemuan warga desa untuk membahas berbagai persoalan yang terjadi. Dua bulan terakhir, obrolan warga seputar kondisi ekonomi dan ketahanan pangan desa memang santer terdengar, baik di pasar, gardu, gubuk sawah maupun dapur rumah. Warga masyarakat tidak semuanya bermatapencaharian sebagai petani, ada pula yang membuka warung di rumah, berdagang di pasar, membuat jamu, berkreasi membuat kerajinan tangan, membuat wayang, dan masih banyak lainnya.

"Desa kita ini memang melimpah sumber daya alamnya, karunia Tuhan yang senantiasa harus kita syukuri," ucap Wartono sang Lurah Desa mengawali pembicaraan.

"Kita juga harus mengolah dan

mengelola kekayaan alam tersebut dengan arif, Pak, bagaimanapun juga adalah milik anak cucu yang dititipkan kepada kita," sahut Warsidi.

"Selama ini warga masyarakat juga masih sering kesulitan kalau ada kebutuhan yang mendesak, mereka bingung mencari pinjaman uang, dan belum adanya wadah ekonomi yang bisa menjadi penguat ekonomi kerakyatan," imbuh Ponijo.

"Makanya, malam ini kita semua berkumpul di balai desa untuk rembukan musyawarah hal-hal apa saja yang perlu dilakukan terkait perekonomian desa dan kesejahteraan bersama itu," jawab Wartono yang juga mempersilakan semua untuk menikmati hidangan yang sudah tersaji.

"Bagaimana menurut Mbah Hardi, sebaiknya kita melakukan apa untuk menguatkan ekonomi desa kita ini?" tanya Pak Lurah yang mempersilakan untuk *ngudhar rasa*⁵ pertama.

Mbah Hardi yang sedang meneguk kopi hitam itu pun memandang ke arah sumber suara itu. Masyarakat desa memang sangat menghormati ketokohan Mbah Hardi, karena terbukti berbagai persoalan desa dapat dicarikan solusi melalui peran serta sesepuh itu.

"Ada baiknya kita semua mengingat kembali apa yang pernah disampaikan oleh Bung Hatta, terkait bagaimana membangun sistem ekonomi yang kokoh dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia," pintanya kepada semua warga yang hadir.

"Konstitusi juga secara jelas menyebutkan bahwa perekonomian

disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Nah, landasan itu yang harus kita semua pegang, intinya terletak pada kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Bung Hatta, meskipun memiliki kekuasaan, dia tetap hidup dalam kesederhanaan, tidak bergelimang kemewahan, bahkan dia ingin membeli sepatu yang diidamkan saja tidak tercapai. Kalian semua tahu apa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi dan koperasi?" tanya Mbah Hardi.

"Koperasi itu wadah ekonomi yang di dalamnya terhimpun anggota yang memiliki tujuan bersama serta adanya keadilan serta pengakuan atas perbedaan dan terbuka," kalimat yang keluar dari mulut Panjul.

"Koperasi menjunjung tinggi prinsip dari, oleh dan untuk anggota, artinya memajukan anggota secara bersama-sama. Kesejahteraan anggota menjadi tujuan dari pendirian koperasi itu, bukan kesejahteraan orang perorang, Mbah," jawab Pitoyo yang duduk di barisan belakang.

"Kalau ekonomi desa kita ingin kuat, memang kerjasama melalui wadah koperasi sebaiknya segera diwujudkan. Perlu juga inventarisasi apa saja potensi desa yang dimiliki, dan kekurangannya apa agar dapat diperbaiki. Bung Karno dalam konsep Tri Sakti juga menekankan Berdikari dalam bidang Ekonomi, yang pada pokoknya bagaimana rakyat, bangsa dan negaradapatmemenuhikebutuhan, dan mewujudkan kesejahteraan melalui kerja keras, membanting tulang, memeras keringat yang didasarkan kekuatan dirinya secara kolektif. Walaupun kita hidup di desa,

CERITA KITA

kita juga harus pintar. Jaman sudah berubah, teknologi berkembang cepat, masyarakat banyak yang berperilaku konsumtif didorong oleh hiper-realitas, makanya sempatkanlah kita membaca buku dan meneladani para pahlawan. Kalau ada kesempatan, berkunjunglah ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang ada di Ungaran itu, atau kita rombongan pergi kesana, bisa kan Pak Lurah?" terang Mbah Hardi sambil tersenyum.

Pak Lurah mengangguk membenarkan ucapan Mbah Hardi. "Mbah Hardi ini sudah seperti filsuf, budayawan, sastrawan, ekonom, sejarawan," dalam hati Pak Lurah.

"Tidak jauh dari desa kita ini, desa tetangga yang masih satu kecamatan, sudah berdiri toko modern berjejer, yang beroperasi 24 jam, loh, Mbah. Wis jan koyo perkotaan tenan, *ra nganggo turu po yo kuwi*," terang Sutiyo yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar desa.

"Betul apa yang disampaikan oleh Mbah Hardi, kita semua harus bekerja sama, gotong royong, mewujudkan kesejahteraan bersama. Koperasi menjadi pilihan yang bisa kita lakukan, menghadapi globalisasi yang makin membuat perputaran roda perekonomian kian tidak adil. Kalau soal kunjungan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah itu usulan yang sangat bagus, saya pribadi sangat mendukung," jelas Pak Lurah.

Bulan Agustus, Desa Tirtorejo kedatangan tamu yang lumayan cukup banyak. Mereka mahasiswa salah

satu kampus negeri dari Yogyakarta, didampingi oleh Kardi dan Santi, dalam kurun waktu 1,5 bulan ke depan akan hidup belajar bersama dengan warga desa. Tentu banyak pengetahuan yang akan mereka dapatkan, ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan betul-betul akan diaplikasikan dalam kemasyarakatan secara nyata.

"Adik-adikmahasiswainiselama1,5 bulan ke depan akan tinggal bersama kita, jadi kami mohon kesediaan dan bantuan dari Bapak Ibu semua untuk memfasilitasi mereka secara baik," pinta Pak Lurah di balai desa yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat masing-masing pedukuhan.

Setelahacara mahtamah, mereka kemudian diajak menuju pedukuhan yang sebelumnya telah ditentukan. Adapun tema besar yang diusung dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) kali ini: "Pemberdayaan Masyarakat Desa Tirtorejo Menuju Desa Wisata yang Mandiri dan Berkelanjutan." Tentu pendidikan menjadi kebutuhan yang mendasar, jikalau bangsa ini memang ingin mewujudkan Tri Sakti, khususnya Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan. Pendidikan menjadi pintu bagi pembentukan karakter bangsa. Karakter yang betul-betul mengenal jati dirinya sebagai bangsa besar, bangsa yang memiliki peradaban luhur, bangsa yang egaliter, dan bangsa yang berdaulat.

Rumah Mbah Hardi yang berada di Pedukuhan Buyutan juga menjadi salah satu pondokan bagi mahasiswa KKN tersebut. Satu subunit terdiri dari 10 orang mahasiswa, dengan latar pendidikan beragam, ada yang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Budaya. Sebelum beristirahat, mereka berkumpul untuk bertukarpandangan dengan Mbah Hardi.

"Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, adik-adik ini harus bersyukur bisa mendapatkan pendidikan formal hingga jenjang pendidikan tinggi. Di luar sana, masih banyak saudara-saudara kita sebangsa yang belum menikmatinya, jadi pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Mbah berpesan kalau sudah mengenyam pendidikan di kampus, jangan lantak congkak dengan yang lain, jangan menganggap bahwa ilmu adik-adik lebih tinggi dari yang lain. Selalu pegang teguh filosofi yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara: Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.

¹Namping merupakan kegiatan membersihkan tanah batas antarsawah (pematang) dari rumput dengan cara mengikisnya menggunakan cangkul.

²Mopok dilakukan setelah petani menamping, yakni dengan menambahkan tanah untuk memperkuat struktur pematang sawah, biasanya dilakukan sebelum musim tanam dan setelah tanah dibajak ada juga yang berbarengan saat sedang dibajak.

³Batas antarsawah yang ditinggikan, sering disebut pematang sawah

⁴Hotel Yamato yang berada di Surabaya menjadi saksi bisu peristiwa heroik, hotel ini sekarang bernama Hotel Majapahit yang berada di Jalan Tunjungan.

⁵Menyampaikan sesuatu hal yang dialami, dipikirkan, dihayati kepada orang lain dengan maksud merefleksikan diri dan menemukan kembali makna hati. Bisa juga disebut menyampaikan uneg-uneg, dan bersama mencari jalan keluar menghadapi persoalan demi kemaslahatan.

⁶Wah, sudah seperti perkotaan saja, tidak tidur apa ya mereka (karyawan toko -red)

SOSIALISASI FINDING AIDS ARSIP KEMARITIMAN (PERDAGANGAN GLOBAL HINDIA TIMUR ABAD XVII-XVIII)



Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi membuka acara Sosialisasi Finding Aids Arsip Kemaritiman di Hotel Amaroosa, Jakarta (06/09)

Jakarta, ARSIP - Program pemerintah saat ini yaitu Nawacita yang diantaranya menitikberatkan pada kemaritiman, yaitu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; dan mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Sejalan dengan program pemerintah tersebut, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki peran serta di dalam menyajikan informasi mengenai arsip-arsip kemaritiman yang diolah informasinya menjadi Finding Aids (sarana bantu penemuan kembali arsip). Finding Aids



Peserta acara Sosialisasi Finding Aids Arsip Kemaritiman

mengenai Arsip Kemaritiman tersebut disosialisasikan di Hotel Amaroosa, Jakarta (06/09).

Acara Sosialisasi dibuka langsung oleh Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi. Dalam arahnya, Sumrahyadi menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya sosialisasi dalam rangka memberikan akses kepada masyarakat terkait dengan arsip-arsip kemaritiman.

Acara sosialisasi menghadirkan pembicara Kepala Bagian Hukum dan Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Rusmana, Direktur Pengolahan Azmi, dan arsiparis ANRI Intan Lidwina yang menjadi koordinator pengolahan arsip maritim. Adapun sebagai moderator Risma Manurung.

Pada kesempatan itu Rusmana memaparkan mengenai batas-batas wilayah kelautan Indonesia dan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam konteks kekinian. Sedangkan Azmi menjelaskan mengenai akses publik terhadap khazanah arsip kemaritiman. Sedang sebagai pembicara terakhir Intan Lidwina mempresentasikan penyusunan finding aids arsip kemaritiman. (sa)

INSTRUMEN IMPLEMENTASI KEARSIPAN AKAN MASUK INDIKATOR PENILAIAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI



Rapat Implementasi Manajemen Kearsipan berbasis TIK

Jakarta, ARSIP - Pada tahun 2017 Program Manajemen Kearsipan Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan menjadi salah satu indikator penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional. Hal tersebut mencuat pada acara rapat Implementasi Manajemen Kearsipan berbasis TIK. Pada rapat tersebut ANRI mengundang Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Teguh Widjinarako untuk bersama-sama menyusun program Manajemen Kearsipan

Birokrasi Berbasis TIK (14/09).

Kebijakan Manajemen Kearsipan Birokrasi Berbasis TIK yang telah disusun meliputi: penetapan kebijakan, pengelolaan arsip, pembinaan kearsipan, pengembangan dan penerapan aplikasi sistem informasi pengelolaan arsip, dan penyediaan infrastruktur penunjang serta penerapan open government melalui JIKN. ANRI telah menyusun konsep kebijakan Manajemen Kearsipan Birokrasi Berbasis TIK dan Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi. Selanjutnya ANRI akan mengirimkan secara resmi konsep

Kebijakan Manajemen Kearsipan Birokrasi Berbasis TIK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat akhir oktober 2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, bahwa ANRI adalah lembaga yang disebut untuk menetapkan dan menjalankan program Manajemen Kearsipan Birokrasi Berbasis TIK. (RPR/SA)

MEMPERINGATI HARI PERHUBUNGAN NASIONAL, ANRI BEKERJA SAMA DENGAN PT. ANGKASA PURA MENYELENGGARAKAN PAMERAN ARSIP TRANSPORTASI UDARA

Jakarta, ARSIP - Memperingati Hari Perhubungan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan PT. Angkasa Pura (AP) 2 menyelenggarakan Pameran Arsip Transportasi Udara di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. Acara pameran dibuka oleh Kepala ANRI Mustari Irawan dan Direktur Pelayanan dan Fasilitas PT AP 2 Ituk Herarindri (21/09). Arsip transportasi yang dipamerkan antara lain arsip mengenai Pesawat Seulawah hasil sumbangan rakyat Aceh, Lapangan Udara Kemayoran, Halim Perdanakusuma, dan Bandara Soekarno Hatta yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1985.

Selain itu, dipamerkan pula mengenai pembuatan pesawat terbang Gelatik oleh PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) tahun 1976 di Bandung yang dikomandani oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. IPTN (1976 – 1998) serta Pesawat Terbang CN 235 pada tahun 1987 saat B.J. Habibie telah menjabat sebagai Menteri Negara Riset, dan Teknologi (1978 – 1998) serta lapangan udara di beberapa wilayah Indonesia. Dalam sambutan Kepala ANRI Mustari Irawan menyampaikan jumlah dan periode arsip yang ditampilkan. “Ada sebanyak 40 foto yang dipamerkan. Foto yang paling lama itu di tahun 1930 ketika Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Jenis pesawat-pesawat zaman dulu itu masih menggunakan baling-baling,” ujar Mustari.

Materi arsip yang ditampilkan memotret keadaan yang sesungguhnya terjadi pada waktu itu. Semangat dalam membangun sarana dan prasarana perhubungan udara tergambar dengan baik dan jelas dalam setiap materi arsip. Pameran



Pameran Arsip Transportasi Udara di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. Acara pameran dibuka oleh Kepala ANRI Mustari Irawan dan Direktur Pelayanan dan Fasilitas PT AP 2 Ituk Herarindri (21/09)

arsip ini dapat mengungkapkan dengan baik peran dan kiprah pesawat udara beserta landasannya yang telah dibangun pada masa lalu. Arsip yang dipamerkan, bukan hanya arsip kertas saja, melainkan arsip foto, maupun arsip film juga akan ditampilkan dalam pameran ini.

Hal ini tentunya sangat baik untuk para pengunjung, sehingga pameran ini terkesan tidak monoton tetapi penuh dengan kreasi. Dengan melihat arsip foto dan arsip film, para pengunjung akan mudah meresapi mengenai peristiwa yang sesungguhnya terjadi pada masa itu. Gambaran peristiwa yang terekam dalam arsip tersebut dapat menjadi sarana pembelajaran dan contoh yang baik bagi kita dari para pendahulu, bagaimana mereka telah berpikir dengan baik untuk mamajukan bangsa dan negara melalui pembukaan lahan untuk landasan pesawat terbang serta pembuatan pesawat terbang yang hingga kini masih dapat dimanfaatkan. Selain itu, dengan adanya pameran

arsip ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian bagi dosen, guru, mahasiswa, pelajar maupun masyarakat umum.

“Fotoyangdipasangini benar-benar langka, tidak ada yang punya jadi harus dilestarikan dan dijaga,” ungkap Ituk Herarindri saat meninjau pameran. Lebih lanjut Ituk juga menyampaikan bahwa pameran arsip ini diharapkan dapat mengedukasi tentang sejarah bandara dan pesawat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan program nawacita Presiden Jokowi khususnya mengenai revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. (sa)

PENYERAHAN APLIKASI SIKD, DORONG UNIVERSITY ARCHIVES DI ITB



Jakarta, ARSIP - Bandung (28/9) - Kegiatan serah terima aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan kepada Institut Teknologi

Bandung (ITB) oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi Miming Miharja bertempat di Ruang Rapat A, Rektorat ITB. Dengan diteruskannya aplikasi SIKD ini diharapkan akan mendukung

terciptanya tertib arsip dan tertib administrasi dan mendorong untuk dibentuknya university archives di lingkungan ITB. (HR)

PT. KAI RAIH AKREDITASI KEARSIPAN DENGAN NILAI "A"

Jakarta, ARSIP - Bandung (28/9) - Dalam rangkaian acara puncak Peringatan HUT PT KAI ke-71 di Pusat Pendidik dan Pelatihan Ir H Djuanda PT KAI, unit dokumen perusahaan KAI berhasil memperoleh sertifikat akreditasi kearsipan dengan nilai A dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sertifikat tersebut diserahkan oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan kepada Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro.

Dalam kegiatan tersebut juga turut diserahkan Piagam Penghargaan KAI sebagai peringkat ke-3 Unit



Kearsipan Terbaik Nasional tahun 2016 kategori BUMN dan meraih peringkat pertama Arsiparis Teladan

Nasional Tahun 2016 atas nama Assistant Manager Land Ownership Document, Erna Purwatiningsih. (HR)

ARSIP STATIS DEPANRI 1955-2015, KINI TERSIMPAN DI ANRI



Penyerahan Arsip statis Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI) oleh Kepala Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) selaku Sekretaris DEPANRI Thomas Djamaluddin dan diterima oleh Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi di Hotel Salak, Bogor.

Jakarta, ARSIP - Bogor (28/9) Arsip Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI) periode 1955-2015 kini tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Arsip statis tersebut diserahkan oleh Kepala Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) selaku Sekretaris DEPANRI Thomas Djamaluddin dan diterima oleh Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi di Hotel Salak, Bogor. Arsip statis DEPANRI yang diserahkan berjumlah sembilan boks arsip.

Penyerahan arsip statis DEPANRI ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyelamatan

arsip lembaga non struktural yang dibubarkan oleh Presiden Jokowi berdasarkan Perpres 176 tahun 2014. Arsip tersebut memperkaya khazanah budaya Indonesia khususnya tentang prestasi anak bangsa di bidang teknologi antariksa dan penerbangan.

Dalam sambutan, Sumrahyadi menyampaikan pentingnya penyerahan arsip statis sebagai bukti sejarah di masa mendatang sebagai memori kolektif bangsa”, ujarnya. Thomas Djamaluddin menambahkan, pentingnya tertib arsip dalam rangka menjaga aset LAPAN dan menjaga arsip bernilai historis. “Arsip merupakan aset negara, jadi

kita harus mengelola secara baik”, ungkapnya. Lebih lanjut Thomas Djamaluddin menambahkan dengan tertib arsip diharapkan dapat menjaga arsip-arsip bernilai historis.

Acara penyerahan arsip statis DEPANRI dilaksanakan di sela-sela acara Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas dan Bimbingan Teknis E-Takah. Selain itu, dilaksanakan pula Pencanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di LAPAN dan pelantikan pengurus cabang AAI LAPAN.(sa)

TIM TASK FORCE MELAKSANAKAN PERBAIKAN ARSIP BENCANA BANJIR BANDANG GARUT

Jakarta, ARSIP - Garut, Jawa Barat (25/9) - Banjir bandang di Kabupaten Garut tidak hanya merugikan harta benda namun juga arsip-arsip penting yang dikelola oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Penanganan arsip yang terkena banjir bandang di Kabupaten Garut oleh Tim Task Force Penanganan Bencana dari ANRI, bekerja sama dengan tim Bapusipda



Kabupaten Garut. Tim gabungan ini juga memberikan pelatihan penanganan arsip yang terkena dampak banjir kepada perwakilan

beberapa instansi, kelurahan dan warga sekitar untuk selanjutnya masing-masing instansi dan perwakilannya mampu melaksanakan penanganan dan perbaikan arsipnya secara mandiri. Arsip yang diperbaiki sejumlah 5.195 boks arsip berupa arsip Catatan Sipil dan arsip Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.(HR)

DHARMA WANITA PERSATUAN SERAHKAN FILM DOKUMENTER



Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan Menuju *Center of Excellence*

Jakarta, ARSIP - Bersamaan dengan pembukaan Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan Menuju Center of Excellence yang diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Dharma Wanita Persatuan menyerahkan

film dokumenter dengan judul “Jejak Langkah Dharma Wanita Persatuan” yang secara simbolis diserahkan oleh Ketua Umum DWP, Wien Ritola Tasmaya yang diterima oleh Sekretaris Utama ANRI, Sumrahyadi.

Film ini merupakan perwujudan pemanfaatan arsip-

arsip sebagai sarana pembelajaran dan mengenalkan kiprah Dharma Wanita Persatuan dari masa ke masa. DWP pula telah menyerahkan arsip sebanyak 17 berkas (0,4 ML) dan 88 lembar foto pada 6 September lalu. (HR)

ANRI JAJAKI KERJASAMA DENGAN HONGKONG PUBLIC RECORDS BUILDING



Deputi Bidang Konservasi Arsip M Taufik dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menjajaki kerjasama ke *Hongkong Public Records Building* diterima Direktur Mr. Zhacary dan para staf Ms. Jessica, Mr. Edward dan Ms Emily dalam rangka peninjauan kerjasama kearsipan

Hongkong, ARSIP - Deputi Bidang Konservasi Arsip M Taufik dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menjajaki kerjasama ke Hongkong *Public Records Building* diterima Direktur Mr. Zhacary dan para staf Ms. Jessica, Mr. Edward dan Ms Emily sebagai upaya dalam

peninjauan kerjasama kearsipan. Acara dilanjutkan pertemuan dengan Konjen RI di Hongkong Tri Tharyat dan Vice Konsul KJRI Mr. Pangky Saputra dalam rangka penyelamatan arsip pemilu dan Kabinet Indonesia Bersatu. Delegasi Indonesia terdiri dari Deputi Bidang Konservasi Arsip

M Taufik, Direktur Akuisisi Arsip Imam Gunarto, Komisioner KPU Hasyim Asyari dan Sekjen KPU Arif Rahman Hakim. Kerjasama dilakukan untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dalam pengetahuan kearsipan dan kerjasama publikasi lainnya.

“TERTIB ARSIP MENJAGA MEMORI KITA” KEMBALI DIGAUNGKAN

Jakarta, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia kembali menyelenggarakan kegiatan Forum Apresiasi Kearsipan Bagi Masyarakat dengan tema “Tertib Arsip Menjaga Memori Kita” pada hari Kamis, 6 Oktober 2016 bertempat di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari. Kegiatan ini dihadiri 136 peserta yang berasal dari guru dan siswa 5 SMA negeri, 18 SMK negeri, 9 SMA swasta, 34 SMK swasta, serta 15 perguruan tinggi negeri dan swasta. Sekretaris Utama ANRI, Sumrahyadi berkesempatan membuka kegiatan ini.

Kegiatan ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengenalkan



Forum Apresiasi Kearsipan bagi Masyarakat

ANRI menambah pengetahuan dan cara memperkenalkan arsip sejak dini kepada masyarakat luas pada khususnya dosen, guru, pelajar, dan

mahasiswa. Oleh karena itu, dihadirkan 3 narasumber dengan materi ANRI dan Layanan Publik oleh Annawaty Betawinda, Pengelolaan Arsip dan Mendukung Tertib Administrasi oleh Sutiana, dan Arsip Sebagai Sumber Sejarah oleh Rudi Andri Syahputra. Acara ini

diakhiri dengan kunjungan ke Records Center, Ruang Restorasi Arsip, Depo Penyimpanan Arsip Konvensional, Reproduksi Arsip, Laboratorium Arsip, dan Ruang Baca Layanan Arsip.

PERKOKOH MANAJEMEN STRATEGIS KEARSIPAN DENGAN IMPLEMENTASI ISO 30301 TENTANG MANAGEMENT SYSTEM FOR RECORDS DAN ISO 15489 TENTANG RECORDS MANAGEMENT

Jakarta, **ARSIP** - Kepala ANRI Mustari Irawan hadir sebagai pembicara dalam Workshop Nasional Kearsipan di Bank Indonesia Bandung dengan tema : Perkokoh Manajemen Strategis Kearsipan dengan Implementasi ISO 30301 tentang Management System for Records dan ISO 15489 tentang Records Management.

Workshop ini diselenggarakan sebagai inisiatif Kantor Perwakilan (KPW) Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat bersama Forum Komunikasi Kearsipan Perbankan



Workshop Nasional Kearsipan dengan tema : Perkokoh Manajemen Strategis Kearsipan dengan Implementasi ISO 30301-*Management System for Records* dan ISO 15489-*Records Management*

(FKKP), diikuti sekitar 210 peserta perbankan serta akademisi perguruan tinggi dari kalangan perbankan dan non

TALKSHOW PENGAJUAN ARSIP GERAKAN NON BLOK (GNB) SEBAGAI MEMORY OF THE WORLD (MOW)



Talkshow di Metro TV dalam program Metro PLUS Pagi bersama Kepala ANRI Mustari Irawan dan Guru Besar FISIP UI Prof. Amy Sri Rahayu mengangkat tema Pengajuan Arsip Gerakan Non Blok (GNB) sebagai *Memory of the World* (MoW)

Jakarta, **ARSIP** - Talkshow di Metro TV dalam program Metro PLUS Pagi bersama Kepala ANRI Mustari Irawan dan Guru Besar FISIP UI Prof. Amy Sri Rahayu mengangkat tema

Pengajuan Arsip Gerakan Non Blok (GNB) sebagai Memory of the World (MoW). Dengan semangat Gerakan Non Blok ini dapat menjadi bagian dari usaha mewujudkan perdamaian dunia

berdasarkan prinsip-prinsip universal tentang kesamaan kedaulatan, hak dan martabat antara negara-negara di dunia.

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DKI JAKARTA RAIH AKREDITASI KEARSIPAN NILAI A



Arsip Nasional Republik Indonesia menyerahkan Sertifikat Akreditasi Kearsipan dengan nilai A kepada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta. Sertifikat diberikan langsung oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Gedung Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta (14/10).

Jakarta, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia menyerahkan Sertifikat Akreditasi Kearsipan dengan nilai A kepada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta. Pada kesempatan ini sertifikat tersebut diberikan langsung oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Gedung Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta (14/10).

Dalam kesempatan tersebut Kepala ANRI, Mustari Irawan menyampaikan

“Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik pula sehingga negara harus mewujudkan tata kelola kearsipan modern.”

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta agar pengarsipan dan perpustakaan yang ada harus dibuat lebih modern lagi. Semuanya harus menggunakan sistem teknologi.

“Saya pikir yang perlu ditingkatkan harus lebih modern, sama arsip kami harus lebih canggih. Jadi lihatnya lebih gampang,” kata Basuki Tjahaja Purnama.

“Pelayanan harus terus kami tingkatkan. Ada kesepakatan bersama dibidang perpustakaan dan arsip itu menjadi urusan wajib,” tandasnya. Turut hadir dalam acara Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah DKI Jakarta, Tinia Budiati. (HR)

ANRI LAKUKAN UJI PUBLIK TERHADAP SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS

Jakarta, ARSIP - ANRI lakukan Uji Publik terhadap Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang merupakan produk sistem kearsipan yang dibuat oleh ANRI. Kepala ANRI Mustari Irawan memberikan sambutan dalam Uji Publik Aplikasi ini. Dalam sambutannya Mustari mengatakan uji publik ini dimaksudkan sebagai wahana untuk mendapatkan feedback dari 176 stakeholder yang telah mengimplementasikan aplikasi SIKD di instansinya.

Diharapkan dengan masukan ini ANRI mampu lebih mengembangkan aplikasi untuk mendukung program RPJMN pemerintah dalam kerangka e-Government yaitu pengelolaan arsip elektronik yang tertib di setiap



Uji publik Sistem Informasi Kearsipan Dinamis

Kementerian/Lembaga Pemerintah pusat dan daerah, Perguruan Tinggi dan BUMN/BUMD. Selanjutnya Kepala Pusat Data dan Informasi Widarno menyampaikan bahwa aplikasi SIKD

ini sangat penting sebagai jantung pendokumentasian rekaman informasi di setiap lembaga, dan sangat penting diimplementasikan untuk bisa mengelola arsip yang tercipta.

Aplikasi SIKD ini telah banyak digunakan oleh Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, BUMN dan BUMD, dan Lembaga Kearsipan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan adanya masukan dari berbagai stakeholder dapat meningkatkan performance aplikasi ini.

ANRI TEKANKAN TERTIB PENGELOLAAN ARSIP DI KBRI AMERIKA

USA, ARSIP - Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI Andi Kasman dan Sekretaris Utama ANRI Sumrahadi memberikan presentasi tentang Penyelenggaraan Kearsipan Nasional (RPJMN 2015-2019) bidang Kearsipan, Manajemen Arsip Dinamis, dan Kebijakan Pengelolaan Arsip Terjaga) pada Forum BIMKOS Kearsipan bagi para Pejabat dan Staf Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk USA didampingi oleh Deputi Chief of Mission Arto Suryodipuro. Pengelolaan arsip menjadi salah satu tahapan penting dalam mengelola seluruh aktifitas di Kedutaan Besar RI di Washington, USA. Banyaknya arsip yang tercipta di setiap instansi harus didokumentasikan melalui sistem kearsipan yang komprehensif.



Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI Andi Kasman dan Sekretaris Utama ANRI Sumrahadi memberikan presentasi tentang Penyelenggaraan Kearsipan Nasional (RPJMN 2015-2019) bidang Kearsipan, Manajemen Arsip Dinamis, dan Kebijakan Pengelolaan Arsip Terjaga) pada Forum BIMKOS Kearsipan bagi para Pejabat dan Staf Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk USA

Delegasi ANRI yang didampingi Diplomat KBRI USA Ibrahim dan Lubis melakukan kunjungan ke *National Archives and Records*

Administration (NARA) dan melakukan Pembahasan Rencana Program Kerjasama Kearsipan, dengan Patrice Murray sebagai International Visitor Liaison Partnerships Division dan Meg Phillips (dengan Telekonferensi dari Philadelphia).

Agenda selanjutnya adalah rapat dengan Ambassador Deputi Permanent Representative Permanent Mission of the Republik of Indonesia untuk PBB Ina Hangningtiyas Krisnamurti didampingi Tim Election Rema, Purna dan David serta Kepala BPKRT PTRI PBB New York Ely Nugraha melakukan Pembahasan Rencana Program Kerjasama Kearsipan dengan PBB, sekaligus penyerahan Arsip untuk dukungan Kampanye Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan PBB.

MEGAWATI HADIRI KONFERENSI INTERNASIONAL PENOMINASIAN ARSIP GERAKAN NON BLOK SEBAGAI MEMORY OF THE WORLD (MOW) DI ALGIERS, ALJAZAIR

Aljazair-ARSIP. Presiden Ke-V Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri hadir sebagai keynote speaker dalam Konferensi Internasional Penominasian Arsip Gerakan Non Blok sebagai Memory of the World (MoW) di Algiers, Aljazair. Ibu Mega didampingi oleh Anggota DPR RI yang sekaligus sebagai Duta Arsip Rieke Dyah Pitaloka. Indonesia dalam hal ini ANRI bersama Serbia, Aljazair, Sri Lanka dan India sebagai nominator bersama (joint nomination) dalam penominasian arsip GNB sebagai MoW UNESCO.



Presiden Ke-V Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri hadir sebagai keynote speaker dalam Konferensi Internasional Penominasian Arsip Gerakan Non Blok sebagai Memory of the World (MoW) di Algiers, Aljazair

Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan dan Kepala Arsip Nasional Aljazair Abdelmadjid Chicky

bersepakat untuk bekerja sama dalam acara Konferensi tersebut dan melanjutkan pembicaraan tentang rencana menerbitkan Joint Publication Indonesia - Algeria Relationship 2017.

Dengan Pengajuan arsip GNB sebagai MoW nantinya diharapkan masyarakat mampu mengambil makna dari proses diplomasi internasional yang dilakukan oleh Indonesia bersama negara-negara penggagas Gerakan Non Blok tentang nilai-nilai perdamaian dunia dan kerjasama selatan-selatan.

MEGAWATI HADIRI PAMERAN ARSIP DI UNESCO, PARIS

Paris-ARSIP. Presiden ke V Megawati Soekarno Putri dan Kepala ANRI Mustari Irawan bertemu Asisten Director General UNESCO Frank La Rue dan Program Spesialis UNESCO Iskra Panevska di Holding Room, Kantor UNESCO. Pertemuan ini dalam rangka pembukaan pameran arsip di kantor UNESCO yang mengambil tema "*Preservation of Indonesian Archives : Asian African Conference, Non Aligned Movement and Indian ocean Tsunami Archives*".

Pameran mengambil tema Arsip Konferensi Asia Afrika yang telah resmi menjadi *Memory of the World* (MoW), dan arsip-arsip yang sedang diajukan menjadi MoW yaitu Arsip Gerakan Non Blok dan Arsip Tsunami di Samudra Hindia.

Megawati membuka pame-



Presiden ke V Megawati Soekarno Putri dan Kepala ANRI Mustari Irawan mengunjungi pameran arsip di kantor UNESCO yang mengambil tema "*Preservation of Indonesian Archives : Asian African Conference, Non Aligned Movement and Indian ocean Tsunami Archives*"

ran arsip yang dihadiri oleh hampir seluruh Duta Besar negara-negara anggota UNESCO, dihadiri Asisten Direktur Jenderal UNESCO Bidang Komunikasi dan informasi Frank La Rue, Anggota DPR RI yang sekaligus

Duta Arsip Rieke Dyah Pitaloka, Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan, Delegasi tetap RI untuk UNESCO Hotmangaradja Pandjaitan, Deputi Bidang Konservasi Arsip M. Taufik, Direktur Akuisisi ANRI Imam Gunarto, Direktur Pemanfaatan ANRI Agus Santoso, Direktur Preservasi ANRI Kandar, utusan diplomatik dan para undangan lainnya.

Duta Besar tetap RI di UNESCO Fauzi Soelaiman mengatakan Arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) dipamerkan di UNESCO karena arsip KAA telah terdaftar sebagai Memory of the World (MoW) UNESCO. Sedangkan arsip Gerakan Non Blok dan arsip Bencana Tsunami Aceh masih dalam proses pengajuan.

ANRI BERPARTISIPASI DALAM PAMERAN INOVASI LAYANAN PUBLIK

Jawa Barat-ARSIP. Pameran dan Workshop : Forum Nasional Inovasi Pelayanan Publik di Bale Asri Pusdai, Bandung tanggal 26 - 27 Oktober 2016. Pameran dihadiri oleh berbagai instansi pusat dan daerah termasuk ANRI untuk menampilkan inovasi layanan publik masing-masing instansinya. Dalam kesempatan ini ANRI menampilkan inovasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sebagai Sistem Informasi yang dirancang dan dikembangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk menangani pengelolaan arsip dinamis di sebuah Instansi atau Organisasi sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan. SIKD ditampilkan melalui salah satu Komputer yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk bisa melakukan simulasi dan mulai



Pameran dan Workshop : Forum Nasional Inovasi Pelayanan Publik di Bale Asri Pusdai, Bandung tanggal 26 - 27 Oktober 2016

menggunakan sebagai sebuah sistem terintegrasi.

Disamping itu diselenggarakan juga Seminar Replikasi Inovasi Pelayanan Publik di Bale Asri Pusdai, Bandung, Jawa Barat dimana salah satu narasumbernya adalah Sekretaris Utama ANRI

Sumrahyadi menyampaikan tentang inovasi dalam bidang kearsipan yang digagas ANRI mengenai Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Untuk mengimplementasikan SIKD sebuah Kementerian/Lembaga (K/L) harus memenuhi persyaratan utama dengan menetapkan Tata Naskah Dinas, Sistem Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip, dan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Dengan SIKD yang sudah menggunakan teknologi komputer dalam mengelola arsip diharapkan setiap K/L yang menerapkannya mampu membuat arsip instansinya tertata rapi dan tertib. Peserta yang ingin bisa mendalami lebih detail dan mempraktekkan fungsionalisasi dan fitur SIKD dapat langsung berkunjung ke stand pameran Arsip Nasional RI.

ANRI HADIRI THE 3RD INDONESIA - KOREA JOINT COMMITTEE MEETING DI BEXCO, BUSAN, REPUBLIC OF KOREA

Korea Selatan-ARSIP. Kepala ANRI Mustari Irawan mendampingi Menteri PAN & RB Asman Abnur menghadiri Korea's Government 3.0 Global Forum 2016, di Bexco, Busan, Korea Selatan pada 9 dan 10 November 2016. Menteri Asman menjadi pembicara dalam forum tersebut membahas mengenai inovasi pelayanan publik di Indonesia. "Untuk merespon laju administrasi yang semakin meningkat dan beraneka ragamnya kebutuhan masyarakat, pemerintahan di seluruh dunia terus mengejar cara baru untuk berinovasi". Di sela-sela seminar Menteri Asman berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Republik Korea Hong Yunsik terkait perkembangan e-government di Indonesia.

Forum ini berlangsung di Government 3.0 Fair, sebuah pameran Government 3.0 yang



Kepala ANRI Mustari Irawan mendampingi Menteri PAN & RB Asman Abnur menghadiri Korea's Government 3.0 Global Forum 2016, di Bexco, Busan, Korea Selatan pada 9 dan 10 November 2016.

meraih kesuksesan besar di berbagai bidang termasuk kolaborasi antara pemerintahan dan publik dan aplikasi ICT yang merupakan sebuah inovasi pemerintahan. Dalam forum ini diharapkan menjadi forum yang

bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik menuju Government 3.0, dengan belajar dari kesuksesan negara lain seperti Korea Selatan dan negara-negara lainnya yang sudah maju.

MENJAGA KEARIFAN LOKAL, ANRI SERAHKAN BUKU CITRA KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan-ARSIP. Halaman Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Balikpapan menjadi tempat bersejarah akan pengelurusan sejarah Kota Balikpapan yang masih simpang siur, Kenapa ?? karena Senin, 14 November 2016 Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mustari Irawan menyerahkan Buku Citra Daerah Kota Balikpapan dalam arsip kepada Walikota Balikpapan Rizal Effendi di depan Direktur Layanan dan Pemanfaatan Arsip dan Direktur Kearsipan Daerah II Arsip Nasional RI, seluruh jajaran Muspida Kota Balikpapan, Sekretaris Kota Balikpapan, seluruh SKPD, camat, lurah, pelaku sejarah, pengelola cagar budaya, Perwakilan perguruan Tinggi, perwakilan sekolah dan tamu undangan lainnya.

Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Balikpapan Hendrik, dalam laporannya menyampaikan bahwa penghargaan Citra Kota Balikpapan merupakan hasil kerja Pemerintah Kota Balikpapan yang sangat mendukung dengan program kearsipan nasional atau di daerah, dan semoga dapat memicu untuk menjadi lebih baik dan semakin maju dalam pelayanan arsip dan kepastakaan Kota Balikpapan.

Mustari Irawan sebelum menyerahkan Buku Citra Kota Balikpapan menjelaskan bahwa program citra daerah sendiri adalah program setiap tahun dari ANRI yang dilakukan berdasarkan beberapa kriteria daerah mana yang layak dan harus di berikan penghargaan tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa Kota Balikpapan adalah kota strategis dan potensial di Kalimantan, karena pada zaman Hindia Belanda, Balikpapan selalu menghasilkan tambang yang banyak



Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mustari Irawan menyerahkan Buku Citra Daerah Kota Balikpapan dalam arsip kepada Walikota Balikpapan Rizal Effendi

dan berkontribusi besar kepada Pemerintahan Hindia Belanda sebab tempatnya sangat strategis di antara lintas selatan, utara, barat dan timur serta tepat berada di tengah-tengah Indonesia.

Beliau juga mengharapkan agar semua koleksi arsip-arsip kearifan lokal dapat terdokumentasikan oleh lembaga kearsipan di tingkat kota karena banyak kearsipan lokal yang tidak terdokumentasi ini perlu untuk menjaga memori kolektif dari suatu daerah karena sebuah daerah pasti memiliki memori kolektif daerah dan nanti bisa menjadi memori kolektif bangsa agar khazanah kekayaan memori kolektif daerah kita tidak dapat di kleam oleh bangsa lain dan Beliau juga mengingatkan bahwa lembaga kearsipan kedepannya memiliki peran yang lebih penting dan besar lagi karena harus menyimpan seluruh arsip-arsip statis yang tercipta di setiap SKPD serta melakukan pembinaan kearsipan di lembaga daerah tersebut.

Dalam sambutannya, Rizal

Effendi sangat mengapresiasi kinerja lembaga kearsipan Kota Balikpapan dan mengharapkan di masa yang akan datang sistem pengelolaan arsip harus dikelola secara moderen mengikuti perkembangan teknologi terkini, sebab ini akan dapat menjadi indikator apakah kota Balikpapan dapat dikatakan sebagai Smart City atau tidak nantinya, oleh karena itu di harapkan semua SKPD dapat mengelola arsip secara baik agar semua aset daerah tidak hilang, baik yang di sengaja maupun tidak dan agar tidak ada pejabat yang masuk penjara karena pengelolaan arsip yang tidak di kelola dengan baik.

Beliau juga meminta kepada seluruh anak didik untuk memanfaatkan lembaga kearsipan ini untuk meningkatkan pengetahuan, sejarah leluhur, sejarah kota, sejarah bangsa agar tidak terserabut dari akar budaya Indonesia, karena kearifan lokal sangat penting untuk membentengi dari lingkungan dunia melalui media komunikasi.

ISO 9001:2015 SEBAGAI PEMICU KERJA DAN KINERJA



Kepala ANRI Mustari Irawan menerima sertifikat ISO 9001:2015 tentang Manajemen Layanan Preservasi Arsip dari Hendry Welong General Manajer PECB

Jakarta-ARSIP. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kembali mendapatkan ISO 9001:2015 dari PECB (Profesional Evaluation and Certification Board) tentang Manajemen Layanan Preservasi Arsip yang diterima langsung oleh kepala ANRI Mustari Irawan dari Hendry Welong General Manajer PECB di Ruang Serbaguna Soemartini Gedung A Lantai 2. (18/11/2016).

Kepala ANRI dalam sambutan pembukaan acara “Sosialisasi Standarisasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 tentang Manajemen Layanan Preservasi Arsip”, mengingatkan bahwa Sertifikat ISO9001:2015 bukanlah tujuan dari sebuah proses khususnya di lingkungan Direktorat Preservasi, tetapi ini merupakan

sebuah pengakuan dari sebuah proses yang telah dilakukan. Sehingga diharapkan Direktorat Preservasi tidak terlena pada pencapaian ini, tetapi justru membuat SDM Direktorat Preservasi lebih optimal dan memacu kerja dan kinerjanya agar kualitas mutu Direktorat Preservasi lebih baik lagi dan sesuai dengan tupoksi dan selaras dengan visi misi ANRI karena core business ANRI yang ada di Kedeputusan Bidang Konservasi Arsip. Jadi SDM Preservasi harus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing secara optimal agar proses layanan arsip pun mampu terdongkrak kinerjanya.

Dalam acara sosialisasi hadir sebagai Narasumber Dirketur Preservasi Arsip Dr. Kandar, MAP dan Perwakilan Smart Cobnsultant Ir.

Iskandar dengan moderator Kasubdit Restorasi Arsip Dra. Widiyanti.

ISO 9001: 2015 pun bisa dimanfaatkan oleh pegawai untuk menunjang pendokumentasian apa yang telah dilakukan selama jam kerja di kantor terkait dengan perolehan remunerasi (tunjangan kinerja). Nantinya target-target kinerja Direktorat Preservasi dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan dibantu oleh pengaplikasian ISO 9001:2015 ini. Untuk menjadi lebih baik, maka kita harus terus berpikir positif atau berpikir sehat untuk diri kita dan lingkungan kita agar kita bisa naik kelas, Tambah M Taufik Deputi Bidang Konservasi Arsip sesaat sebelum penutupan acara.

EKSPOSE INVENTARIS ARSIP DEPARTEMEN VAN BINNENLANDSCH BESTUUR AFDEELING A

Jakarta-ARSIP. Direktorat Pengolahan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) gelar Ekspose Inventaris Arsip *Departement van Binnenlandsch Bestuur*, yang di era kemerdekaan dikenal sebagai Departemen/ Kementerian Dalam Negeri. Ekspose dilaksanakan untuk mensosialisasikan hasil Penyusunan Inventaris Arsip *Departement van Binnenlandsch Bestuur Afdeeling A*, sekaligus untuk mendapat masukan dan saran dari narasumber dan peserta ekspose. Selanjutnya, masukan dan saran yang kami peroleh akan menjadi bahan bagi Tim untuk melaksanakan penyempurnaan Draf yang telah disusun. Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Konservasi M. Taufik saat membuka acara ekspose.

Panitia ekspose menghadirkan narasumber Djoko Utomo (Kepala Arsip Nasional RI tahun 2004 - 2009) dan Direktur Pengolahan ANRI Azmi. Pada kesempatan itu Djoko Utomo memberikan masukan terkait dengan penyusunan Inventaris Arsip *Departement van Binnenlandsch*



Deputi Bidang Konservasi M. Taufik saat membuka acara ekspose.

Bestuur. Sedangkan Azmi memaparkan proses penyusunan Inventaris Arsip *Departement van Binnenlandsch Bestuur*.

Peserta ekspose terdiri atas pejabat struktural dan fungsional di lingkungan ANRI, serta peserta dari berbagai Kementerian dan Lembaga: Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota DKI, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PPATK,

Badan Pelayanan Satu Pintu DKI, serta rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Jakarta.

Minat para peneliti terhadap Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur cukup besar, karena beragamnya informasi yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya perlu disusun secara optimal, agar peneliti dapat mengakses dengan mudah, cepat dan efektif. (sa)

ANRI LAUNCHING DIGITAL TOOLKIT BUKU “DIGGING4DATA”

Jakarta-ARSIP. Buku *Digging4Data* merupakan panduan praktis bagaimana cara mencari data dalam arsip, khususnya arsip kearsitekuran. *Digging4Data* ditujukan untuk semua orang yang tertarik melakukan penelitian, namun secara khusus bagi mereka yang terlibat dalam proyek-proyek peninggalan sejarah, meliputi: Arsitek; Perencana Kota; Pejabat Pemerintah; Peneliti dari beragam latar belakang. Panduan ini menjelaskan sejumlah metode mengenai penelitian arsitektur pada masa Kolonial Belanda (1620-1950);



menyediakan informasi mengenai sumber informasi pendukung dan lembaga-lembaga yang memberikan

informasi historis; menyediakan alat dan metode pengumpulan data dan informasi histori.

BAWASLU DAN DKPP SERAHKAN ARSIP KE ANRI

Jakarta-ARSIP. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk ketiga kalinya menyerahkan arsip bernilai guna permanen sepanjang tahun 2016 kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini diserahkan arsip peraturan Bawaslu dan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Arsip Bawaslu secara simbolis diserahkan oleh Ketua Bawaslu, Muhammad dan arsip DKPP diserahkan oleh Sekretaris Jendral DKPP, Gunawan Suswanto kepada Kepala ANRI, Mustari Irawan di Ruang Rapat Gedung Bawaslu, Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya, Muhammad mengatakan, Bawaslu sangat berkomitmen menata arsip. Menurutnya, semakin tertib dalam menata arsip maka akan berdampak pada kinerja yang semakin baik. Hal inilah yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu.

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswanto menambahkan, Indonesia akan



Penyerahan arsip Bawaslu secara simbolis oleh Ketua Bawaslu, Muhammad dan arsip DKPP diserahkan oleh Sekretaris Jendral DKPP, Gunawan Suswanto kepada Kepala ANRI, Mustari Irawan

menjadi laboratorium Pemilu. Arsip ini akan membantu sebagai sejarah bangsa. "Suatu saat ketika orang belajar tentang pengawasan pemilu dan integritas penyelenggara pemilu maka akan datang ke Bawaslu dan DKPP.

Sementara Kepala ANRI Mustari Irawan sangat mengapresiasi Bawaslu dan DKPP yang sudah

mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan untuk menyerahkan arsip statis ke ANRI.

"Tahun ini merupakan tahun ketiga, Bawaslu dan DKPP menyerahkan ke ANRI. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di Bawaslu dan DKPP sudah semakin baik dan terus menerus semakin baik," ujarnya.

ARSIP PRESIDEN SOEKARNO PERIODE 1945 - 1967 TELAH SIAP DIAKSES

Jakarta-ARSIP. Direktorat Pengolahan Arsip Nasional Republik Indonesia menggelar kegiatan "Ekspose Guide Arsip Presiden Republik Indonesia Soekarno 1945 - 1967" yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Guide Arsip Presiden RI, kegiatan dibuka oleh Kepala ANRI Mustari Irawan dalam sambutannya Kepala ANRI juga berharap Guide Arsip dapat membantu masyarakat untuk melakukan penelusuran arsip terkait dengan arsip Presiden RI.

Selanjutnya Kepala ANRI menyampaikan bahwa Melalui arsip Sukarno yang telah dikumpulkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), masyarakat lebih mudah mendapat informasi secara utuh tentang Sukarno.



Guruh Soekarno Putra saat memberikan sambutan "Ekspose Guide Arsip Presiden Republik Indonesia Soekarno 1945 - 1967"

Hadir pula dalam kegiatan tersebut putra Presiden Soekarno, Guruh Soekarno Putra, dalam

sambutannya beliau berharap arsip menjadi sumber terpercaya dalam informasi kepresidenan Republik Indonesia. Guruh Sukarno Putra mengenang ayahnya yang dikenal sebagai proklamator kemerdekaan negeri ini. "Indonesia adalah Sukarno, Sukarno adalah Indonesia, Indonesia tanpa Sukarno bukanlah Indonesia, Sukarno juga bukan Sukarno kalau tanpa Indonesia.

Banyak kisah tentang Bung Karno di era Orde Baru diputarbalikkan dan banyak yang dimusnahkan, makanya mari kita kumpulkan arsip-arsip yang tidak dimunculkan pada masa itu," ujar Guruh.

MEWUJUDKAN REVOLUSI MENTAL MELALUI IMPLEMENTASI INPROVISIA



Pencanangan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Lingkungan ANRI

Jakarta-ARSIP. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) laksanakan Pencanangan Gerakan Nasional Revolusi Mental (01/12). Acara ini merupakan implementasi dari Reformasi Birokrasi dan amanat Presiden Republik Indonesia tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada pidato kenegaraan di Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 14 Agustus 2015. Hal ini juga masuk dalam agenda Nawacita (Dimensi Pembangunan Manusia) yang menjadi arah pembangunan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla tahun 2015 – 2019.

Pencanangan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Lingkungan ANRI ini adalah sebagai awal dimulainya penerapan Nilai-Nilai ANRI, yakni Integritas, Profesional, Visioner, Sinergi, Akuntabel (INPROVISIA) bagi seluruh pegawai

di lingkungan ANRI, baik pejabat struktural maupun fungsional. Nilai-Nilai ANRI, yakni INPROVISIA sebenarnya sejalan dengan Nilai-Nilai Revolusi Mental, yakni Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong. Kepala ANRI Mustari Irawan sampaikan penerapan nilai-nilai ANRI sebagai wujud menciptakan budaya organisasi. "Oleh karenanya, tidak berlebihan apabila saya mengatakan bahwa acara ini merupakan Gerakan Membangun Budaya Organisasi di lingkungan ANRI", jelasnya.

ANRI telah memiliki Nilai-Nilai dan Perilaku Utama ANRI yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala ANRI Nomor 83 Tahun 2015. Penetapan Nilai-Nilai dan Perilaku Utama ANRI ini sebagai langkah awal dalam upaya membangun BUDAYA ORGANISASI di lingkungan ANRI.

"Saya tidak menginginkan upaya ini berhenti di Penetapan Nilai-Nilai dan Perilaku Utama ANRI. Oleh karenanya, saya telah minta kepada Sestama untuk menyiapkan langkah-langkah kongkrit untuk melakukan perubahan mindset dan culture set seluruh pegawai ANRI agar Nilai-Nilai dan Perilaku Utama ANRI ini mengurat dan mengakar, serta mengalir dalam aliran darah setiap pegawai ANRI", Jelas Mustari. Ini berarti Budaya Organisasi telah terbangun di ANRI, menjadi identitas dan jati diri pegawai ANRI. Disamping itu, terbangunnya Budaya Organisasi di ANRI dampaknya sangat vital bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan kearsipan nasional yang menjadi tanggung jawab ANRI. (sa)

PERERAT HUBUNGAN BILATERAL, ANRI DAN SAAC GELAR PAMERAN ARSIP SOSIAL BUDAYA INDONESIA – TIONGKOK

Jakarta-ARSIP. Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok telah dimulai sejak periode Pra-Kolonial. Hingga hari ini, kedua negara masih melakukan kerja sama di berbagai bidang termasuk bidang kebudayaan yang dilakukan melalui kerja sama kearsipan antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Arsip Nasional Republik Rakyat China (SAAC). Kedua lembaga kearsipan menyelenggarakan pameran arsip bersama di Museum Nasional, Jakarta pada 2–6 Desember 2016. Program ini merupakan bagian dari Kesepahaman Bersama antara kedua institusi tentang kerja sama kearsipan. Tema utama dari pameran ini adalah “Hubungan Sosial dan Budaya antara Indonesia dan Tiongkok” yang menggambarkan kondisi imigran Tiongkok di Indonesia dari berbagai aspek. SAAC menampilkan koleksi Dokumen Pengiriman Uang dan Surat Qiaopi yang dikirim oleh imigran Tiongkok di luar negeri khususnya di Indonesia. Di sisi lain, ANRI menyajikan berbagai arsip menarik tentang kehidupan sosial dan budaya etnis Tiongkok di akhir abad 19 dan awal abad 20. Kolaborasi ini menciptakan pengetahuan tentang Diaspora etnis Tiongkok di Indonesia dari sudut pandang kedua negara.

Pameran arsip hubungan sosial dan budaya Indonesia dan Cina ini memberikan pendidikan dan pengetahuan serta gambaran secara lebih luas kepada para pengunjung dan masyarakat mengenai terjalinnya persahabatan kedua negara tersebut sejak ratusan tahun yang lalu. Menurut catatan sejarah, hubungan awal antara Indonesia dengan Cina dimulai dari adanya sebuah ikatan perdagangan yang terjalin sebelum



Pameran Hubungan Sosial dan Budaya antara Indonesia dan Tiongkok

masa pemerintahan Dinasti Han Timur yang berkuasa antara tahun 23 – 220. Selama berabad-abad kemudian Cina terlibat dalam perdagangan maupun hubungan secara keagamaan. Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 adalah tempat pavorit para biksu Cina untuk mempelajari karya klasik Buddha serta tempat transit dalam perjalanan panjang mereka menuju dan dari India.

Hubungan antara Indonesia dan Cina mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Dinasti Ming sekitar tahun 1420. Selama periode tersebut banyak pengaruh kebudayaan Cina yang berasimilasi dan berakulturasi dengan kebudayaan dari Indonesia. Aktivitas yang dilakukan orang-orang Cina yang datang ke Nusantara pada waktu itu, telah memberi gambaran yang jelas mengenai hubungan yang terjadi, baik dari segi sosial maupun budaya. Dari hubungan yang terjadi, maka terjalinlah kebudayaan yang

kuat diantara kedua belah pihak yang sampai sekarang ini masih kita rasakan dampaknya. Pada sisi lainnya, Cina digambarkan sebagai kekuatan yang baik hati, yang selama berabad-abad telah membawa fasilitas dan pengayaan budaya, yang berkisar dari sejumlah kosa kata dalam bahasa Indonesia dan desain motif batik hingga bentuk khusus dari ekspresi kesusasteraan. Kepala ANRI Mustari Irawan menyampaikan harapannya terhadap penyelenggaraan pameran. “Diharapkan melalui pameran ini, dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi para pengunjung pameran dan masyarakat pada umumnya mengenai bagaimana awal mula sejarah perkembangan hubungan Indonesia – Tiongkok khususnya di awal penyebarannya ke Indonesia”, jelasnya. (sa)

WORKSHOP PENYELAMATAN ARSIP KEPRESIDENAN

Jakarta-ARSIP. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selenggarakan Workshop Penyelamatan Arsip Kepresidenan (8/12) di Gedung ANRI, Jalan Ampera Raya Nomor 7, Cilandak Jakarta Selatan. Workshop bertujuan untuk merumuskan berbagai solusi dalam rangka menjabarkan Program Arsip Kepresidenan, khususnya menyelamatkan arsip yang terkait dengan aktivitas atau kegiatan presiden mulai dari Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sampai dengan Presiden Jokowi untuk dapat dilestarikan di ANRI dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan kebangsaan, kemasyarakatan, pemerintahan, dan pembangunan.

Salah satu tugas penting yang diemban oleh ANRI sebagai lembaga negara adalah menyelamatkan arsip statis, yakni arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan dari perjalanan negara dan bangsa ini. Perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini juga tidak terlepas dari peran presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sosok presiden merupakan unsur penting dalam dinamika perkembangan negara, sehingga arsip yang terkait dengan sosok presiden ini harus diselamatkan, dilestarikan dan dimanfaatkan.



Workshop Penyelamatan Arsip Kepresidenan (8/12) di Gedung ANRI, Jalan Ampera Raya Nomor 7, Cilandak Jakarta Selatan.

Kepala ANRI Mustari Irawan menyampaikan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI) memiliki peranan strategis dalam mendukung penyelamatan Arsip Kepresidenan.

“Dalam konteks dukungan *stake holder* terhadap kesuksesan program Arsip Kepresidenan, Kementerian Sekretariat Negara adalah institusi kunci yang telah lama bekerjasama dengan ANRI”, ujarnya. Lebih lanjut Mustari Irawan menyampaikan bahwa tata kelola arsip Setneg RI sudah berjalan sangat baik, hal ini dibuktikan dengan lengkapnya seluruh pedoman dan instrumen kearsipan, fasilitas pengelolaan arsip dan penyerahan arsip statis yang teratur setiap tahun. Berdasarkan hasil audit kearsipan yang terakhir, Kementerian Sekretariat Negara

memperoleh nilai yang terbaik (2 besar terbaik tingkat Kementerian).

Pada sela-sela acara Workshop Penyelamatan Arsip Kepresidenan, dilaksanakan pula serah terima arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di dalamnya terdapat foto-foto tentang pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Dengan adanya penyerahan arsip tersebut KPU telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan sekaligus memberikan warisan yang sangat berharga bagi generasi mendatang tentang penyelenggaraan Pemilu di era reformasi serta mendukung Program Arsip Kepresidenan. (sa)

MENELUSURI SEJARAH PERTAMBANGAN TIMAH PULAU BANGKA MELALUI NASKAH SUMBER ARSIP



Launching dan talkshow Naskah Sumber Arsip Pertambangan Timah di Pulau Bangka Pada Masa Kolonial menghadirkan narasumber Sutedjo Sujitno (tengah) Penulis Buku Sejarah Timah Indonesia (13/12)

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan *Launching* dan *Talkshow* Naskah Sumber Arsip Pertambangan Timah di Pulau Bangka Pada Masa Kolonial (13/12). Penyelenggaraan launching dimaksudkan agar para pengguna arsip dapat mengetahui dengan baik mengenai arsip yang tersimpan di ANRI, khususnya yang berkaitan langsung dengan masalah pertambangan. Arsip pertambangan ini merupakan salah satu khazanah arsip yang tersimpan di ANRI.

“Naskah Sumber Arsip Pertambangan ini merupakan naskah sumber pertama yang dibuat oleh ANRI. Naskah Sumber Arsip Pertambangan Timah di Pulau Bangka menampilkan khazanah arsip statis bernilai guna kebhuktian dan sejarah bagi proses pertambangan yang terjadi di Indonesia pada masa kolonial

Belanda”, ujar Kepala ANRI Mustari Irawan. Melalui arsip pertambangan timah yang telah disusun ini akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai proses pencarian lokasi tambang, pembangunan infrastruktur, penggalian, pengolahan serta pemanfaatan dan pemasarannya.

Dalam penulisan naskah sumber arsip ini pulau yang menjadi konsentrasi pertambangan adalah Pulau Bangka. Pemilihan pulau tersebut karena Pulau Bangka merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia sejak masa kolonial. Walaupun ada beberapa pulau lain antara lain Karimun, Riau, Kundur, Belitung, Bangkinang, dan pulau lainnya. Dalam perkembangannya timah-timah yang telah dihasilkan oleh pulau-pulau tersebut jumlah timah yang dihasilkan tidak sebesar Pulau Bangka.

Setelah VOC masuk ke

Pulau Bangka terjadilah kontrak dagang dengan sistem monopoli, yakni penguasa Bangka dan Balitung mengakui VOC sebagai pelindung dan berjanji tidak akan menjalin kerjasama dan berhubungan dengan bangsa lainnya. Sejak itu eksploitasi pertambangan timah telah dilakukan secara besar-besaran oleh VOC. Namun sejak VOC runtuh, maka eksploitasi pertambangan timah tersebut dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Acara *Launching* dan *talkshow* menghadirkan narasumber Sutedjo Sujitno Penulis Buku Sejarah Timah Indonesia. Dengan adanya *Launching* dan *Talkshow* Naskah Sumber Arsip Pertambangan Timah di Pulau Bangka Pada Masa Kolonial dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai arsip yang tersimpan di ANRI. (sa).